



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISA PERBANDINGAN KETIMPANGAN EKONOMI REGIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT DAN PROPINSI SUMATERA UTARA

SKRIPSI



**YUDHA RAMADHANI
07151100**

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

5. Bapak Febriandi Prima Putra, SE, M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, yang telah membimbing penulis dalam menulis skripsi.
6. Ibu Dra. Erniati Husni, M.Si selaku Pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam penyusunan program studi.
7. Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, serta kepada seluruh karyawan Jurusan Ilmu Ekonomi atas semua pelayanan yang telah diberikan selama ini.
8. Ibu Mimi, Ibu Syam, ni Nel beserta seluruh karyawan Biro jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, serta karyawan Dekanat yang telah mempermudah penulis dalam proses kuliah sampai penulis menyelesaikan study.
9. Melalui skripsi ini juga, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis. Kepada Ayahanda/ papa, Suparmin (ALM), terimakasih karena telah berjuang dengan ikhlas membanting tulang dan mencurahkan keringat demi memperjuangkan keluarga, serta tidak pernah bosan dalam memberikan nasehat dan motivasi kepada anak-anakmu. Dan kepada Ibunda/ mama, Syafmaini, merupakan ibu terbaik yang penuh dengan kesabaran membimbing anak-anaknya menuju jalan yang baik. Terimakasih ibu atas segala pengorbanan, cucuran keringat, dan air mata yang keluar dalam membimbing kami, anak-anakmu, selama ini.
10. Terima kasih juga buat keluarga besar ku di Padang, Unin dan bang Daus, Abang dan kak Revi, dan Bang Ngeon !! atas motifasi serta pengarahannya selama ini, juga buat keponakan ku atu-atunya moza, moga lekas besar. *I Love U My Family*
11. Terimakasih juga buat teman-temanku di Erick yang telah menampung segala masalah-masalah penulis hampir empat tahun lamanya. Makasi buat Ibu Atul, Bapak Win, Mas Wir, Kak Sur, Kak Des, Kak Lola, Desi, Yeni, Wide, Epi, Satri, Ipit, Lona, Dedek, Mardha, Rika, n Ani. Thank's For you All.

12. Thanks to my Bro, Hamirun alias bang Master Kumcloud dan Andri dengan sifat empatinya yang menggemaskan, atas persahabatannya slama ini semoga kesuksesan dapat kita raih bersama. Kepada sobat² ku; Aaw, Aya, Ee, Eka, Hajal, Dayat, Lusi, Rizky, terimakasih atas kebersamaan dan "kegilaan²" slama ini, kalian telah mengisi keseharian ku dengan penuh makna. Kepada teman² seperjuangan; Anggia, Eca, Rian, Mira, Redha, Imel, Mery, Yesi, Nia, Heri, Rivo, Mahlil, Eno, Yelma, Rio, Oki, Ayu, Melati, Endah, Febi, Kiki, Aan, Jefri, dan teman² Jurusan Ilmu Ekonomi '07 yang tidak disebutkan namanya, terimakasih atas dukungan dan kebersamaan kita selama ini, mudah²an kita semua sukses sesuai dengan harapan masing-masing.
13. Terimakasih juga buat keluarga tempak KKn penulis di Sungai Tanang, Uni Emi, Uni Yun, Amak, serta teman-teman KKN, Era, Eko, Rini, Andra, Yulia, Intan, Maya, Diprat, Reza, Vita, Jane, Nora, Andri, n Mr. Jack, serta seluruh teman² yang berpartisipasi dalam program² KKN di Sungai Tanang.
14. Terakhir, penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak Suryadi yang telah membantu dan melayani penulis dengan sabar dalam peminjaman buku² dan bahan² bacaan yang mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan dan kemajuan bersama. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi pembaca pada khususnya dan pengambil kebijakan pada umumnya. Amin.

Padang, Agustus 2011

Penulis



Yudha Ramadhani

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Datar tabel	iv
Daftar grafik	vi
Daftar gambar	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Tujuan dan Manfaat	
1.4.1 Tujuan Penelitian	9
1.4.2 Manfaat Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	11

BAB II KERANGKA TEORI DAN TIMJAUAN EMPIRIS

2.1 Kerangka Teori	13
2.1.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi	13
2.1.2 Teori Pertumbuhan ekonomi Menurut Ilmu Ekonomi Regional	
2.1.2.1 Model Basis Ekspor	15
2.1.2.2 Model pembangunan interregional income	15
2.1.2.4 Neo-Klasik	16
2.1.2.4 Model Pennyebab Kumulatif	17
2.1.2.5 Pusat Pertumbuhan	18

2.1.3	Konsep Ketimpangan (Disparitas) Daerah	19
2.1.4	Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan	23
2.1.5	Penanggulangan ketimpangan antar wilayah (Menurut Sjafrizal, 2008: 21-125)	25
2.1.5.1	Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan	25
2.1.5.2	Mendorong Transaksi Dan Migrasi Spontan	26
2.1.5.3	Pengembangan Pusat Pertumbuhan	27
2.1.5.4	Pelaksanaan Otonomi Daerah	28
2.2	Tinjauan Empiris	30
2.3	Hipotesa	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Data dan Sumber Data	38
3.2	Pembentukan Model	39
3.3	Definisi Operasional Variabel	41
3.4	Teknik Pengolahan Data Metode Analisis data	45
3.5	Uji Statistik	48

BAB IV GAMBARAN UMUM TINGKAT KETIMPANGAN EKONOMI REGIONAL SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

4.1	TINGKAT KETIMPANGAN.....	51
4.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Ekonomi Regional.....	61
4.2.1	Potensi Sumber Daya Alam	61
4.2.2	Kondisi Demografis	64
4.2.3	Mobilitas Barang dan Jasa	66
4.2.4	Dana Perimbangan	70

BAB V	PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	
5.1	Penemuan Empiris	73
5.1.1	Koefisien Determinasi (R^2)	76
5.1.2	Pengujian F-test	77
5.1.3	Uji T-test	78
5.1.4	Uji Multikolinearitas	85
5.1.5	Uji Heteroskedastisitas	86
5.1.6	Koefisien Regresi	88
5.2	Implikasi Kebijakan	90
BAB VI	Penutup	
6.1	Kesimpulan	94
6.2	Saran	98

Daftar Pustaka

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

DAFTAR TABEL

Table 2.1	Ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia tahun 1995-2003	33
Table 2.2	Indeks Ketimpangan pembangunan antar Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2000-2003	34
TABEL 4.1	PDRB perkapita Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001-2008 Menurut Harga Konstan Tahun 2000	52
TABEL 4.2	PDRB perkapita Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001-2008 Menurut Harga Konstan Tahun 2000	54
TABEL 4.3	Data Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001-2008	56
TABEL 4.4	Data Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2008.....	57
TABEL 4.5	Data Tingkat Ketimpangan Ekonomi Regional Antar Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001- 2008.....	59
TABEL 4.6	Produktifitas Padi Sawah/Padi Ladang Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat Dan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 (Dalam Satuan Ton)	62
TABEL 4.7	Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Dan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 (Dalam satuan %)	65

Tabel 4.8	Data Persentase Migrasi Penduduk Masuk Ke Suatu Daerah Menurut Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat Dan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008	67
TABEL 4.9	Data Nilai Dana Perimbangan Menurut Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat Dan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 (Dalam Satuan Rupiah)	71
TABEL 5.1	Hasil Uji Multikolinearitas	85

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Hipotesa Neo-Klasik.....	17
Grafik 2.2	Tingkat Ketimpangan Ekonomi Regional Di Negara Amerika Serikat Tahun 1920-2008	36
Grafik 5.1	Perkembangan Tingkat Ketimpangan Ekonomi Regional Antar Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2008	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Ekonomi Pusat Pertumbuhan	18
Gambar 5.1 Uji Heterosdekastisitas – Scatterplot	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara merupakan dua wilayah yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi, budaya dan sebaran sumber daya alam yang beranekaragam. Hal ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda antar wilayah propinsi Sumatera Barat dengan wilayah propinsi Sumatera Utara. Perbedaan pertumbuhan ekonomi antara wilayah tersebut merupakan suatu bentuk ketimpangan perekonomian antar kabupaten/kota di wilayah tersebut.

Dalam perkembangan perekonomian suatu daerah tidak akan terlepas dari berbagai macam bentuk ketimpangan perekonomian. Menurut hipotesa Neo-Klasik pada awal mula proses perkembangan perekonomian suatu negara, maka ketimpangan perekonomian yang terjadi pada pembangunan antar daerah di negara tersebut akan cenderung semakin membesar (Sjafrizal, 2008: 105). Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai puncaknya atau daerah yang memiliki tingkat perkembangan maksimal, maka akan mengalirkan perkembangannya tersebut ke daerah yang lain. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan antar daerah tersebut akan semakin mengecil. Dan tolak ukur keberhasilan dari pembangunan dari suatu wilayah adalah semakin kecilnya tingkat ketimpangan perekonomian antar daerah atau antar sektor (Kuncoro, 2004: 127).

Sementara itu tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk,

antar daerah dan antar sektor. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoritikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoritikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas, (Arsyad, 1997).

Menurut (Budiman, 2000), pembangunan mula-mula diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi. Suatu masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Secara sederhana, segenap kegiatan ekonomi baik berupa produksi barang maupun jasa suatu daerah dalam satu satuan waktu (tahun) dapat dijadikan indikator. Dalam hal demikian, perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dijadikan acuan. Pendekatan demikian secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Sehingga banyak negara yang menganggap PDRB sebagai ukuran terbaik dari pembangunan (Mankiw, 2000: 25).

Perhitungan total PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk tiap-tiap daerah memang menggambarkan kekayaan daerah dari sudut produksi dan kegiatan ekonomi. Namun, belum tentu kekayaan propinsi juga menjadi kekayaan penduduknya, karena tidak semua kegiatan

ekonomi dimiliki oleh masyarakat di suatu daerah. Bisa saja suatu daerah hanya menjadi tempat terjadinya kegiatan ekonomi, yang kepemilikannya justru datang dari luar. Atau, sumber daya alam berada di daerah tersebut, namun segala produk dan kegiatan ekonominya diatur oleh korporasi global dan pemerintah pusat. Sehingga hasilnya pun lebih banyak yang ditarik keluar daerah tersebut atau ke pemerintah pusat. Dengan kata lain, manfaat dan alokasi investasi dari keuntungan bagi hasil dan pajak dinikmati oleh pemerintah pusat, untuk itu salah satu gambaran riil mengenai kemakmuran penduduk bisa digunakan tingkat konsumsi per kapita.

Propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara terdiri dari beberapa kabupaten/kota yang menjalankan perekonomian dengan cara dan strategi berbeda-beda. Setiap kabupaten/kota juga memberikan sumbangsih bagi perekonomian yang tidak sedikit. Setiap kabupaten/kota, mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi di propinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode tahun 2001-2008, secara umum PDRB di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara atas harga konstan tahun 2000 menunjukkan adanya peningkatan, dimana pada tahun 2001 total nilai PDRB Sumatera Barat sebesar Rp. 44.674.569,25 juta menjadi sebesar Rp. 71.233.000,00 juta pada tahun 2008. Sedangkan pada propinsi Sumatera Utara PDRB meningkat dari tahun 2001 sebesar Rp. 136.903.270,26 juta menjadi sebesar Rp. 213.932.000,00 juta pada tahun 2008. Bila dilihat laju pertumbuhan selama periode pengamatan, maka pada tahun 2008 laju pertumbuhan Propinsi Sumatera Barat adalah yang paling tinggi yaitu sebesar 6,36 % dan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 3,66 %. Sedangkan laju pertumbuhan Propinsi Sumatera Utara

tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 6,90 %, dan terendah pada tahun 2001 yaitu sebesar 3,98 %, (Sumber : BPS Kota Padang 2011).

Peningkatan PDRB secara umum juga terjadi disetiap kabupaten dan kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Kabupaten/kota yang mempunyai kontribusi terhadap PDRB Sumatra Utara terbesar adalah kota Medan yaitu sebesar Rp. 22.187.985,65 juta pada tahun 2001 dan meningkat menjadi Rp. 65.222.000,00 juta pada tahun 2008. Sedangkan pada propinsi Sumatera Barat, kabupaten atau kota yang memiliki kontribusi terbesar adalah kota Padang yaitu sebesar Rp. 8.038.700,10 juta pada tahun 2001 dan meningkat menjadi Rp. 20.124.000,00 juta pada tahun 2008. Pada propinsi Sumatera Barat kabupaten atau kota yang memiliki kontribusi terkecil terhadap PDRB adalah kota Padang Panjang yaitu sebesar Rp. 275.597,79 juta. Sedangkan pada propinsi Sumatera Utara kabupaten atau kota yang memiliki kontribusi terkecil terhadap PDRB adalah Sibolga yaitu sebesar Rp. 506.290,93 juta, (sumber : BPS Kota Padang 2011).

Menurut (Budiono, 1999: 1), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Disini jelas bahwa ada dua sisi yang perlu diperhatikan , yaitu Output total (PDRB) dan sisi jumlah penduduk. Dilihat dari sisi jumlah penduduk Propinsi Sumatera Barat terjadi peningkatan sepanjang periode pengamatan yaitu sebesar 2.082.020 jiwa pada tahun 2001 menjadi sebesar 4.697.464 jiwa pada tahun 2007. Sedangkan pada propinsi Sumatera Utara terjadi peningkatan sepanjang periode pengamatan yaitu sebesar 11.722.397 jiwa pada tahun 2001 menjadi sebesar 12.326.678 jiwa pada tahun 2005. Pada propinsi Sumatera barat yang mempunyai jumlah penduduk terbesar adalah kota Padang dengan jumlah penduduk mencapai 838.190 jiwa pada tahun 2007 dan jumlah penduduk terkecil adalah pada kota Padang Panjang sebesar 52.017 jiwa pada tahun 2007. Sedangkan

pada propinsi Sumatera Utara kota/kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah pada kota Medan sebesar 2.036.185 jiwa pada tahun 2005. Dan terkecil pada kabupaten/kota Samosir sebesar 131.073 jiwa pada tahun 2005, (Sumber data : BPS Kota Padang 2011).

Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah atau region pada suatu Negara, merupakan suatu bentuk dari ketimpangan ekonomi regional. Dimana terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi antar region yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan baik masalah ekonomi maupun sosial dan politik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Adapun penulis memilih Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara adalah karena penulis menganalisis seberapa besar perbedaan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara, serta dampak yang ditimbulkannya bagi kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan ekonomi regional antar daerah semakin besar juga menganalisis kelebihan/keunggulan yang dimiliki daerah tersebut, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi pembangunan pada setiap kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Setelah penulis melihat perbedaan serta perbandingan tingkat ketimpangan ekonomi regional propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara beserta faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi regional, maka dari analisa itu, akan dapat menjadi pedoman mengambil kebijakan pembangunan ekonomi di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Kuncoro, 2004: 127, menyatakan bahwa pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antar daerah sering kali menjadi masalah yang serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara

beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Ada pendugaan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan pelaksanaan pembangunan tidak merata pada tiap-tiap kota/kabupaten sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi regional.

Pebedaan dalam bentuk faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional yang terjadi di Propinsi Sumatera Barat dengan propinsi Sumatera Utara menjadi unsur utama dalam perbedaan tingkat ketimpangan ekonomi regional di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara, yang ditimbulkan dari tingkat keunggulan dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kelancaran mobilitas barang dan jasa, tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, serta pengalokasian dana pembangunan antar wilayah tersebut (Sjafrizal, 2008: 117-120). Dimana dari hasil penelitian tersebut akan diambil suatu langkah kebijakan yang efektif dan efisien dalam pembangunan ekonomi regional disetiap kabupaten/kota propinsi Sumatra Barat dan propinsi Sumatera Utara.

Menurut (Sjafrizal, 2008: 119), mengatakan bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini menjadi dasar pentingnya membenahi kondisi pembangunan ekonomi regional suatu daerah untuk menjadikan kegiatan perekonomian berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Ketimpangan pembangunan memang merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dan komponen masyarakat.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Alasan penulis dalam mengambil daerah penelitian yaitu kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara bertujuan untuk memperbandingkan antar satu daerah dengan suatu daerah yang lebih baik dari pada daerah tersebut untuk dapat mengambil implikasi kebijakan yang tepat dalam mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara, dengan alasan sebagai berikut :

1. Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara sama-sama berada pada kawasan kepulauan Sumatera dan merupakan Negara Indonesia Bagian Barat. Kedua propinsi tersebut juga memiliki rata-rata produktifitas tanaman padi yang sebanding.
2. Perbandingan luas wilayah dan jumlah penduduk di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara adalah satu berbanding tiga (data ditunjukkan oleh BPS kota Padang). Namun dari penelitian awal dapat disimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi regional yang terjadi antar kabupaten/kota propinsi Sumatera Barat jauh lebih besar dari ketimpangan ekonomi regional yang terjadi antar kabupaten/kota propinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan ada suatu faktor yang menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi regional di propinsi Sumatera Utara tersebut.
3. Tujuan utama penulis dalam menganalisis adalah untuk menghipotesa implikasi kebijakan yang terbaik dari perbandingan kedua wilayah tersebut untuk mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi regional terutama antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat.

4. Selain itu dilakukan perbandingan ketimpangan antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara, karena diantara propinsi-propinsi yang ada di pulau Sumatera, propinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar adalah pada propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengangkat judul :
**“ANALISA PERBANDINGAN KETIMPANGAN EKONOMI REGIONAL
PROPINSI SUMATERA BARAT DAN PROPINSI SUMATERA UTARA.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menganalisis seberapa besar tingkat ketimpangan ekonomi regional yang terjadi antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana menganalisis pengaruh faktor penyebab ketimpangan ekonomi regional terhadap tingkat ketimpangan perekonomian di Sumatera Barat dan Sumatera Utara?
3. Bagaimana mengidentifikasi Implikasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana menganalisis pengaruh faktor penyebab ketimpangan ekonomi regional terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional di propinsi Sumatera Barat Dan Sumatera Utara. Variable-veriabel yang

dipergunakan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan ekonomi regional terhadap ketimpangan ekonomi regional di gunakan data nilai PDRB perkapita dan PDRB kabupaten/kota menurut harga konstan tahun 2000 di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara serta data jumlah penduduk kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara dari tahun 2001-2008 data ini berfungsi sebagai data tingkat ketimpangan ekonomi regional pada tiap-tiap kabupaten/kota yang ada di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Kemudian dianalisis hubungannya dengan faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi regional, yang digunakan adalah data produktifitas tanaman padi sebagai indikator dari kandungan sumber daya alam, data tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebagai indikator dari kondisi demografis, serta dana perimbangan sebagai indikator dari tingkat alokasi dana pembangunan antar wilayah di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara yang merupakan bentuk data crosssectional dalam tahun 2008. Namun masih terdapat variabel penyebab ketimpangan ekonomi regional lain yang belum dapat dianalisis.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk menghitung dan menganalisa tingkat ketimpangan perekonomian di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisa pengaruh faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi regional terhadap tingkat ketimpangan perekonomian di Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

3. Mengidentifikasi implikasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan dalam pengimplementasian serta pengambilan keputusan kebijakan dalam pengalokasian dana pembangunan kepada kabupaten dan kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara sesuai dengan kondisi perekonomiannya, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan menambah pengetahuan masyarakat, tentang bagaimana suatu wilayah tersebut dapat meningkatkan tingkat perekonomiannya dengan ketimpangan perekonomian antar wilayah yang dapat dikendalikan.

3. Bagi penulis

Sebagai salah satu wadah untuk mengembangkan potensi diri dalam interaksi perekonomian. Terutama dalam mengetahui seberapa besar dampak ketimpangan perekonomian suatu wilayah terhadap pembangunan ekonomi di setiap kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi kedalam enam bab. Dimana masing masing bab terdiri dari sub-sub yang lebih rinci, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang pemilihan judul, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Hipotesa, Ruang Lingkup Pembahasan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN EMPIRIS

Berisikan pendekatan teori dan menyajikan penelitian terdahulu yang akan menjadi tinjauan literatur dalam penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisa metode analisa data, bentuk pembentukan model serta pengujian model.

BAB IV : GAMBARAN UMUM SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Berisikan gambaran dan data-data gambaran umum serta data-data variabel yang mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional.

BAB V : PENEMUAN EMPIRIK DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Merupakan bab yang memperlihatkan hasil penelitian serta implikasi kebijakan.

BAB VI : PENUTUP

Merupakan bab yang menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN EMPIRIS

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dicapainya pada masa sebelumnya (Kuncoro, 2004: 123). Menurut pandangan para ekonom klasik maupun Neo-Klasik, pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu : (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985)

Menurut (Sjafrizal, 2008: 85), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi regional merupakan bagian penting dalam analisa ekonomi regional, karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisa pertumbuhan ekonomi regional ini adalah menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh dengan cepat dan ada pula yang bertumbuh dengan lambat. Disamping itu, analisis pertumbuhan ekonomi regional juga dapat menjelaskan mengapa terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah. Berbeda dengan teori ekonomi makro, teori pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada teori pertumbuhan ekonomi regional ini memasukkan unsur-unsur lokasi dan wilayah secara eksplisit sehingga kesimpulan yang dihasilkan juga berbeda. Menurut (Sjafrizal, 2008: 86), kemampuan daerah untuk tumbuh

sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang satu sama lain adakalanya juga saling mempengaruhi.

Kuznest (1955), dalam (Todaro, 1995: 148) merupakan orang yang telah berjasa dalam memelopori analisis pola-pola pertumbuhan histeris di Negara-negara maju mengemukakan bahwa, pada tahap-tahap pertumbuhan ekonomi awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap berikutnya hal itu akan membaik. Observasi yang inilah yang kemudian di kenal dengan konsep kurva U-terbalik dari Kuznets.

Menurut ekonom Perancis Perroux (1988) seperti yang di kutip (Kuncoro, 2004: 129), dalam teori kutup pertumbuhannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat (kutup) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tanpa terjadinya proses pemerataan pendapatan atau sebaliknya pemerataan pendapatan tanpa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ketimpangan (Esmara, 1986: 391). Selanjutnya, (Esmara, 1986: 392) menyatakan bahwa aspek pertumbuhan ekonomi sebenarnya hanya merupakan salah satu komponen tingkat kehidupan atau indikator pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidaklah identik dengan pembangunan ekonomi, tatapi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Sedangkan pemerataan pada dasarnya berarti menyalurkan lebih banyak hasil-hasil pembangunan dari golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi serta sektor-sektor ekonomi moderen yang padat modal yang telah tumbuh dengan cepat kepada golongan masyarakat yang berpendapatan rendah serta sektor-sektor ekonomi tradisional yang padat karya yang hanya berkembang dengan lambat (Wie, 1983: 24) .

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Ilmu Ekonomi Regional

Perkembangan ilmu ekonomi regional sampai saat ini, menunjukkan bahwa ada empat model pertumbuhan ekonomi yang bersifat dominan. Masing-masing model menggunakan variabel dan formulasi tersendiri dan menghasilkan analisa serta kesimpulan tentang faktor pertumbuhan ekonomi regional yang tersendiri pula. Menurut (Sjafrizal, 2008), ide-ide pokok dan formulasi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 Model Basis Ekspor (Export-base Model)

Merupakan model yang dikembangkan oleh Douglas C. North pada tahun 1956. Menurut model ini pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh keuntungan komparatif yang dimiliki daerah tersebut. Bila daerah tersebut memiliki keuntungan komparatif sebagai basis ekspor. Maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan dapat ditingkatkan.

2.1.2.2 Model Interregional Income

Perluasan dari model basis ekspor dapat dilakukan dengan memasukkan unsur hubungan ekonomi antar wilayah yang dikenal sebagai interregional income model yang dikembangkan oleh Harry W. Richardson (1978). Berbeda dengan model basis ekspor yang mengasumsikan ekspor sebagai exogeneous variabel, akan tetapi di asumsikan sebagai endogeneous variabel yang ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antar wilayah. Selanjutnya kegiatan perdagangan antara daerah tersebut dibagi atas barang konsumsi dan barang modal. Dengan demikian terlihat bahwa pendapatan

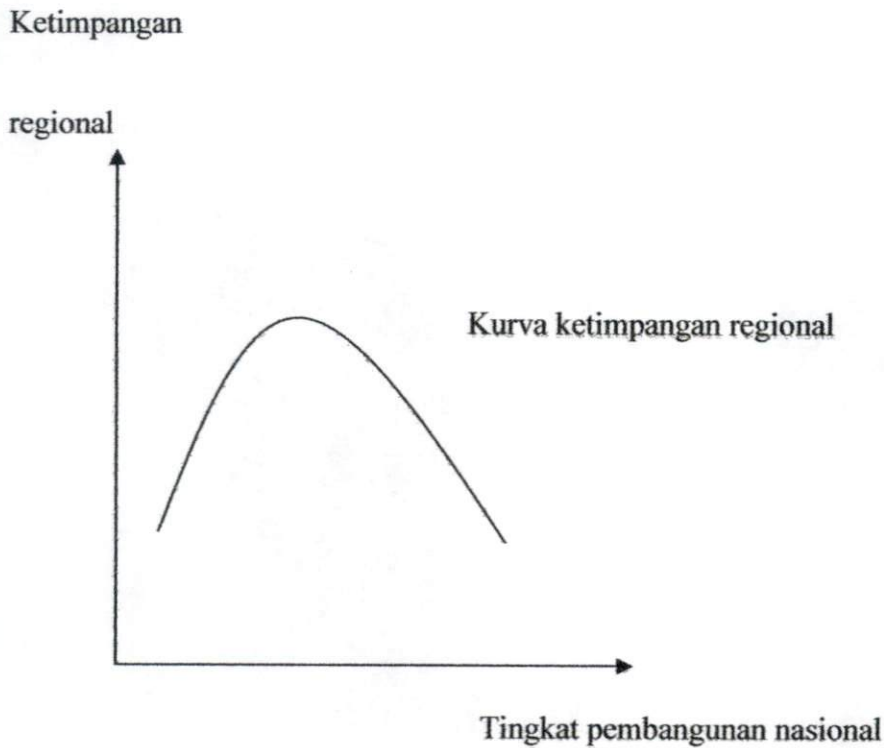
regional suatu region ditentukan oleh unsur pengeluaran autonomous ditambah dengan ekspor region bersangkutan.

2.1.2.3 Model Neo-Klasik

Model ini dipelopori oleh George H.Bort (1960) dengan mendasarkan analisisnya pada teori ekonomi Neo-Klasik. Menurut model tersebut, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemakmuran daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobolitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah.

Dalam hal yang dianut model Neo-Klasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Akibatnya, pada saat itu modal-modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan regional terus berlanjut, dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian, nantinya setelah negara yang bersangkutan berkembang, maka ketimpangan pembangunan regional akan berkurang (convergence). Perkiraan ini merupakan kesimpulan kedua dari model ini dan kemudian dikenal sebagai hipotesa Neo-Klasik yang digambarkan oleh grafik (2.1) berikut :

Grafik Hipotesa Neo-Klasik



Grafik 2.1 Hipotesa Neo-Klasik

(Sumber : Sjafrizal, 2008: 97)

2.1.2.4 Model Penyebab Berkumulatif

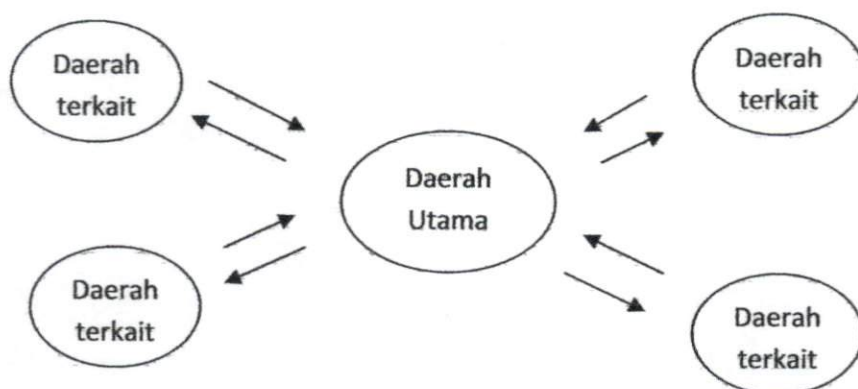
Model penyebab berkumulatif ini pertama kali dikemukakan oleh Nikolas Kaldor yang merupakan kritikan terhadap model Neo-Klasik. Model penyebab komulatif ini tidak percaya pemerataan pembangunan antara daerah akan dapat dicapai dengan sendirinya berdasarkan mekasisme pasar. Menurut model ini, ketimpangan pembangunan regional hanya akan dapat dikurangi melalui program pemerintah. Apabila hanya diserahkan pada mekanisme pasar, maka ketimpangan regional akan terus meningkat seiring dengan peningkatan proses pembangunan, (Sjafrizal, 2008: 87-102).

2.1.2.5 Pusat Pertumbuhan

Model ini dikembangkan oleh Perroux dan Richardson (1978), dalam buku Syafrizal (2008). Menjelaskan bahwa adanya konsentrasi kegiatan ekonomi pada daerah tertentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Konsentrasi pada suatu daerah terjadi jika daerah tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Adanya sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu.
2. Konsentrasi tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam perekonomian.
3. Terdapat keterkaitan faktor produksi yang kuat antar daerah tersebut
4. Pada daerah tersebut terdapat sebuah industry induk yang mendorong kegiatan ekonomi.

Pusat pertumbuhan atau konsentrasi tersebut dapat dijelaskan dengan gambar berikut:



Gambar 2.1 Struktur Ekonomi Pusat Pertumbuhan

Dari gambar 2.1, terlihat bahwa terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi pada daerah utama, yang berfungsi sebagai industri induk dan kegiatan ekonomi lainnya yang saling terkait satu sama lainnya. Sehingga mampu menyebarkan pertumbuhan ekonomi ke daerah sekitar dari pusat pertumbuhan tersebut.

2.1.3 Konsep Ketimpangan (Disparitas) Daerah

Menurut Sjafrizal 2008: 104, ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan suatu aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibatnya dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan jika pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah yang maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menurut Suparmoko dalam (Said, 2005: 16), tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah peningkatan pendapatan riil per kapita serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha. Unsur keadilan atau

pemerataan penghasilan tersebut lebih dikenal sebagai distribusi pendapatan yang terjadi pada masyarakat sering kali mengalami ketimpangan.

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, keterampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antara sektor ekonomi suatu daerah (Kuncoro, 2004: 133). Selanjutnya menurut Ardani (1992), mengemukakan bahwa kesenjangan atau ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu perubahan dalam pembangunan itu sendiri (Kuncoro, 2004: 133).

Adelman dan Moris berpendapat bahwa kesenjangan pendapatan di daerah ditentukan oleh jenis pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh ukuran negara, sumber daya alam, dan kebijakan yang dianut. Dengan kata lain, faktor kebijakan dan dimensi struktural perlu diperhatikan selain laju pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 1997: 111).

Fakta empirik menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pembangunan yang terjadi di Negara-negara sedang berkembang sebenarnya bukanlah karena kesalahan pemerintah atau masyarakat, tetapi juga hal tersebut terjadi diseluruh negara. Peningkatan ketimpangan ini bahkan sampai memicu terjadinya perselisihan antara wilayah, seperti yang terjadi di Indonesia seperti pemberontakan PRRI-Persemesta di

Sumatera Barat, Gerakan aceh merdeka dan gerakan Papua merdeka, (Sjafrizal, 2008: 107).

Teknik pengukuran tingkat ketimpangan perekonomian dapat diukur dengan dua cara sebagai berikut, (Sjafrizal, 2008:108-110) ;

1. Dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (regional inequality) yang dinamakan dengan formula Theil Indeks. Formula ini digunakan dengan tujuan untuk lebih dapat mengetahui secara sekaligus ketimpangan pembangunan antar propinsi dan antara kabupaten/kota, mengingat ketimpangan pembangunan pada tingkat propinsi berkaitan langsung dengan ketimpangan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota, maka pengukuran ketimpangan dengan menggunakan Theil Index ini sangat penting artinya dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut (Sjafrizal 2008: 115). Sebagaimana yang di gunakan oleh Akita dan Alisyahbana (2002) dalam buku (Sjafrizal, 2008: 109), dalam studi yang dilakukan di Indonesia dipergunakan beberapa data yaitu PDRB Per kapita untuk setiap wilayah, jumlah penduduk dan lain-lain, dengan formula sebagai berikut :

$$T_d = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \{y_{ij}/Y\} \log [\{y_{ij}/Y\} / \{n_{ij}/N\}] \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana :

T_d = indeks Theil

y_{ij} = PDRB per kapita kabupaten I di propinsi j

Y = jumlah PDRB per kapita seluruh propinsi j

n = jumlah penduduk kabupaten I di propinsi j

N = jumlah penduduk seluruh kabupaten

Hasil penafsiran tingkat ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dengan menggunakan formulasi Theil Index (Td), semakin mendekati nol (0) maka semakin kecil tingkat ketimpangan yang terjadi pada daerah tersebut, dan sebaliknya semakin mendekati satu (1) maka semakin besar tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi pada daerah tersebut.

2. Indeks ketimpangan Williamson digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan. Indeks ini menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat kemakmuran antar kelompok. Dengan demikian, formulasi indeks Williamson ini secara statistic dapat ditampilkan sebagai berikut :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \cdot \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y} \dots\dots\dots(3.2)$$

Dimana : $0 < V_w < 1$.

V_w = tingkat ketimpangan

y_i = PDRB per kapita

y = PDRB rata-rata seluruh wilayah

f_i = jumlah penduduk wilayah i

n = jumlah penduduk seluruh wilayah

Subkrib w digunakan karena formulasi yang digunakan adalah secara tertimbang sehingga indeks tersebut dapat dibandingkan dengan negara atau daerah lainnya. Sedangkan pengertian indeks ini adalah sebagai berikut ; bila V_w mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila V_w mendekati 0 berarti sangat merata.

2.1.4 Faktor Yang Menyebabkan Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan perekonomian di sebabkan oleh banyak faktor, menurut Sjafrizal, 2008: 117, diantara penyebab terjadinya ketimpangan perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relative murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki sumber daya alam tinggi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki sumber daya alam yang rendah.

2. Perbedaan kondisi demografis

Faktor utama lainnya yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan yaitu perbedaan kondisi demografis, yang meliputi tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan

kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki daerah tersebut.

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat juga mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori oleh pemerintah maupun migrasi secara alami. Jika mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan dari produktivitas tidak tersebar ke daerah lain dan tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain tersebut, akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung semakin membesar.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonomi cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian sebaliknya, jika konsentrasi suatu daerah relative rendah maka selanjutnya juga akan mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat pada daerah tersebut.

5. Alokasi dana pembangunan

Tidak dapat disangkal lagi bahwa investasi merupakan salah satu faktor terpenting yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu,

daerah yang mendapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah atau investasi swasta, maka pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut akan cenderung meningkat.

2.1.5 Penanggulangan ketimpangan antar

Menurut Sjafrizal, 2008 : 121-125, ketimpangan perekonomi antar wilayah merupakan suatu indikator keberhasilan pembangaunan ekonomi suatu Negara, semakin kecil tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah suatu Negara, berarti kondisi perekonomian negara tersebut akan membaik. Kebijakan dan upaya untuk menanggulangi ketimpangan pembangunan antar wilayah sangat ditentukan oleh faktor yang menentukan terjadinya ketimpangan tersebut. Dalam hal ini diutamakan adalah upaya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan ketimpangan ekonomi regional dalam suatu Negara.

2.1.5.1 Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan

Salah satu penyebab ketimpangan ekonomi regional merupakan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam yang cukup besar antar daerah. Sementara itu, ketidak lancaran proses perdagangan dan mobilitas faktor produksi antar daerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi regional tersebut. Karena itu, kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi regional tersebut adalah dengan memperlancar mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah.

Upaya untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah adalah dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan prasarana dan sarana perhubungan keseluruhan pelosok wilayah. Prasarana perhubungan yang dimaksudkan disini adalah fasilitas jalan, terminal dan pelabuhan laut guna mendorong proses perdagangan antar daerah. Sejalan dengan hal tersebut jaringan dan fasilitas telekomunikasi juga sangat penting untuk dikembangkan agar tidak ada daerah yang terisolir dan tidak dapat berkomunikasi dengan daerah lainnya. Disamping itu pemerintah juga perlu pula mendorong berkembangnya sarana perhubungan seperti perusahaan angkutan antar wilayah. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka ketimpangan regional antara wilayah akan dapat dikurangi karena usaha perdagangan dan mobilitas faktor produksi, khususnya investasi akan dapat lebih diperlancar dengan demikian, daerah yang kurang maju akan dapat pula meningkatkan kegiatan perdagangan dan investasi di daerahnya, sehingga kegiatan produksi dan penyediaan lapangan pekerjaan akan dapat pula ditingkatkan. Semua ini akan mendorong proses pembangunan antar daerah yang kurang maju.

2.1.5.2 Mendorong Transaksi dan Migrasi Spontan

Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi regional antar daerah, kebijakan dan upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong pelaksanaan transmigrasi dan migrasi spontan. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk ke daerah kurang berkembang dengan menggunakan fasilitas dan dukungan pemerintah. Sedangkan migrasi spontan adalah perpindahan penduduk yang

dilakukan secara sukarela menggunakan biaya sendiri. Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh pembangunan daerah berdanglutan akan dapat teratasi.

Indonesia sudah sejak lama melaksanakan program tranmigrasi ini untuk mencapai dua tujuan secara sekaligus. Pertama, program transmigrasi ini dilakukan untuk dapat mengurangi kepadatan penduduk yang terdapat dipulau jawa yang telah memicu peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Kedua, program transmigraso tersebut juga dilakukan dalam rangka mendorong proses pembangunan didaerah terbelakang yang menjadi tujuan transmigrasi sehingga lahan yang luas tetapi belum dapat dimanfaatkan kerena keterbatasan tenaga kerja akan dapat teratasi. Dengan digerakannya kegiatan pertanian melalui pemanfaatan tenega transmigrasi akan dapat ditingkatkan sehingga ketimpangan ekonomi regional antar wilayah akan dapat dikurangi.

2.1.5.3 Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Kebijakan lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah melalui pengembangan pusat pertumbuhan (Growth Poles) secara tersebar. Kebijakan ini diperkirakan akan mengurangi ketimpangan ekonomi regional antar wilayah karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi secara sekaligus. Aspek konsentrasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan mesih terus mempertahankan tingkat efisiensi usaha yang sangat diperlukan untuk pengembangan usaha tersebut. Sedangkan aspek desentralisasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan antar daerah

dapat dilakukan sehingga ketimpangan ekonomi regional antar daerah dapat dikurangi.

Penerapan konsep pusat pertumbuhan ini untuk mendorong proses pembangunan daerah dan sekaligus untuk mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi regional antar wilayah dapat dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada kota-kota skala kecil dan menengah akan berkembang sehingga kegiatan pembangunan ekonomi dapat lebih disebarakan ke pelosok daerah. Sedangkan upaya untuk menguירangi ketimpangan ekonomi regional antar wilayah melalui peningkatan pertumbuhan pembangunan daerah perdesaan ternyata sering gagal dilakukan karena tidak dapat dipertahankan efisiensinya karena lokasi yang sangat terpencar. Disamping itu, pemilihan lokasi kegiatan ekonomi di daerah perdesaan juga sering kali tidak memenuhi persyaratan ekonomi dari segi keuntungan lokasi yang dapat mendukung pengembangan usaha yang bersangkutan.

2.1.5.4 Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan juga dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi regional antar wilayah. Hal ini jelas karena, dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktifitas pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan Karena adanya wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakkan. Jika hal ini dapat

dilakukan, maka proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan, ketimpangan ekonomi regional antar daerah akan dapat pula di tanggulangi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan mulai tahun 2001 yang lalu. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola kegiatan pembangunan di daerah masing-masing (desentralisasi pembangunan). Sejalan dengan hal tersebut, masing-masing daerah juga diberikan tambahan alokasi dana yang diberikan dalam bentuk “Block Grant” berupa dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil dari sumber daya alam, dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU). dengan cara demikian diharapkan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan daerah dapat ditingkatkan dan ketimpangan pembangunan antar daerah secara bertahap dapat dikurangi.

2.2 Tinjauan Empiris

Tadjoeddin dkk. (2001) dalam Tambunan (2006), menganalisa ketimpangan regional pada tingkat yang lebih dis-agregat dengan memakai data kabupaten/kota tahun 1996. Mereka menemukan bahwa jumlah kabupaten/kota yang ada pada tahun itu, ada sejumlah kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita yang sangat tinggi yang menjadikan daerah-daerah itu sebagai daerah-daerah kantong (enclave), yang antara lain disebabkan oleh keberadaan migas, atau SDA lainnya. Menurut mereka, dilihat dari sebaran PDRB per kapita, daerah-daerah kantong ini bisa ditempatkan sebagai data pencilan (uot layers). Hasil penghitungan Tadjoeddin dkk. (2001) menunjukkan bahwa PDRB per kapita dari tujuh pusat produksi migas, yakni Aceh Utara, Kepulauan Riau dan Bengkalis (Riau), Kutai, Bulungan dan Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Fak-fak (Papua) menguasai 72% dari PDB migas nasional. Tujuh daerah ini ditambah dengan tiga belas kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita yang sangat tinggi setelah dikurangi dengan penghasilan dari migas termasuk kedalam kedua kategori tersebut. Hasil perhitungan mereka menunjukkan bahwa semua daerah kantong itu dengan jumlah penduduk hanya sekitar 9% dari total popopulasi Indonesia menyumbang sekitar 33% dari PDRB nasional.

Kuncoro (2004), dalam penelitiannya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam periode pengamatan 1993-2000, terjadi kecendrungan peningkatan ketimpangan, baik di analis menggunakan indeks Williamson maupun dengan indeks entropy Theil. Dari hasil analisis menggunakan indeks Williamson menunjukkan bahwa rata-rata ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan di kabupaten Banyumas yang sebesar 0,426 lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi di Propinsi Jawa

Tengah, yaitu sebesar 0,691. Ketimpangan antar kecamatan yang terjadi di Kabupaten Banyumas dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 cenderung meningkat. Pada tahun 1993 nilai ketimpangan indeks Williamson mencapai 0,35 dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,47 pada tahun 2000.

Sedangkan dengan menggunakan indeks ketimpangan Entropy Theil pada periode tahun 1993-2000, rata-rata ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Banyumas sebesar 0,0396. Seperti indeks Williamson, indeks entropy Theil juga menunjukkan kecenderungan terjadinya peningkatan. Pada tahun 1993, nilai indeks entropy Theil sebesar 0,032 dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 0,046. Dimana yang menyebabkan ketimpangan ini salah satunya adalah disebabkan oleh aktivitas ekonomi secara spasial, Kuncoro (2004).

Dalam penelitian ini hipotesis kurva U-Terbalik Kuznets dapat dikatakan berlaku di Kabupaten Banyumas. Hal ini berarti bahwa, pada masa awal pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, ketimpangannya akan semakin meningkat dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun. Sedangkan berdasarkan perhitungan analisis korelasi perarson antara pertumbuhan PDRB dengan indeks Williamson dan indeks Entropy Theil, didapatkan nilai - 0,24 dan - 0,422. Ini berarti bahwa ada korelasi yang sangat kuat secara statistik karena terbukti tidak signifikan pada $\alpha = 10\%$.

Pawanto (2006), dalam penelitiannya terhadap ketimpangan pendapatan regional di Jawa selama periode 1998-2001 menyimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan analisis entropy Theil selama kurun waktu tahun 1992-2001 menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Kesenjangan pendapatan dalam propinsi tertinggi dipegang oleh propinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena di Jawa Timur terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita sangat tinggi sebagai akibat adanya tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi, serta menjadikan daerah tersebut sebagai daerah kantong. Sedangkan kesenjangan pendapatan dalam propinsi terendah berada pada propinsi DI Yogyakarta.
 - b. Kesenjangan pendapatan antar propinsi tertinggi dipegang oleh propinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena Jawa Timur memiliki ke-khususan karakteristik ekonomi dengan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi, yang pada tahap selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap tingkat pembentukan dan pertumbuhan PDRB, seperti keberadaan sektor industri pengolahan. Sedangkan kesenjangan pendapatan antar propinsi terendah dipegang oleh Propinsi DI Yogyakarta.
 - c. Kesenjangan pendapatan regional di Jawa sangat dipengaruhi oleh tingkat kesenjangan pendapatan antar propinsi yang mengalami fluktuasi. Terlebih pada tahun 2000 terjadi penurunan sebagai akibat adanya pemekaran wilayah. Hal ini dikarenakan oleh adanya pemekaran wilayah yang telah membuat laju pertumbuhan PDRB khususnya Jawa Barat mengalami pertumbuhan negatif, yang secara langsung sangat mempengaruhi terhadap kesenjangan pendapatan regional di Jawa pada tahun tersebut, atau menunjukkan penurunan.
2. Korelasi antara PDRB dengan kesenjangan pendapatan regional di Jawa tidak Signifikan. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan antara pertumbuhan PDRB dan tingkat kesenjangan pendapatan, atau jika terjadi peningkatan pertumbuhan

PDRB maka peningkatan tersebut tidak akan mempengaruhi tingkat kesenjangan pendapatan, Sumber data : Pawanto (2006).

Studi lainnya yang juga membahas tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia adalah (Sjafrizal, 2002), untuk priode tahun 1993-2000. Disamping mengukur tingkat ketimpangan dan tendensinya, studi ini juga mencoba melihat pengaruh ibu kota Jakarta terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. Untuk keperluan ini, maka indeks ketimpangan diukur baik menggunakan data termasuk DKI Jakarta dan diluar DKI Jakarta.

Table 2.1 Ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia tahun 1995-2003

Tahun	Termasuk DKI Jakarta	Diluar DKI Jakarta
1993	0,56	0,44
1994	0,59	0,46
1995	0,63	0,48
1996	0,67	0,49
1997	0,69	0,51
1998	0,66	0,52
1999	0,67	0,53
2000	0,66	0,52
2001	0,65	0,51
2002	0,65	0,51
2003	0,64	0,50

Sumber data : Sjafrizal, 2004: 114.

Dari table 2.1 dapat dilihat temuan yang menarik dari studi ini adalah bahwa pengaruh ibu kota Jakarta terhadap ketimpangan antar daerah di Indonesia ternyata cukup besar dibandingkan dengan propinsi. Namun demikian, hasil perhitungan dengan mengeluarkan DKI Jakarta ternyata indeks ketimpangan tersebut masih juga cukup tinggi

yaitu sekitar 0,50 dibandingkan dengan negara lain dan juga mempunyai tendensi yang terus meningkat antar waktu sebagaimana ditemukan terdahulu.

Dengan demikian terlihat bahwa perhitungan indeks ketimpangan dengan mengeluarkan DKI Jakarta ternyata hal tersebut lebih tepat karena daerah-daerah tersebut terdapat perbedaan struktur perekonomian daerah.

Penelitian lain (sjafrizal, 2008: 189-191), tentang menganalisis tingkat ketimpangan ekonomi pembangunan antar kabupaten/kota, antar kabupaten saja serta antar kota saja di Sumatera Barat, dengan data nilai ketimpangan ekonomi pembangunan sebagai berikut :

Table 2.2 Indeks Ketimpangan pembangunan antar Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2000-2003

NO	Jenis Ketimpangan Antar wilayah	2000	2001	2002	2003
1.	Antar kabupaten dan kota	0.423	0.435	0.446	0.454
2.	Antar kabupaten	0.173	0.175	0.166	0.176
3.	Antar Kota	0.329	0.354	0.369	0.398

Sumber data : Sjafrizal, 2004: 191

Dengan membandingkan antara indeks ketimpangan gabungan kabupaten dan kota dan indeks ketimpangan secara terpisah terlihat bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi daerah akan tinggi bila kabupaten dan kota digabungkan dalam analisis. Hal ini sesuai dengan semula. Sedangkan bila ketimpangan antar kabupaten dipisahkan maka ketimpangan menurun sangat drastis, yaitu bergerak antara 0.166 - 0.175 dengan peningkatan yang sangat rendah. Ini berarti pembangunan antar kabupaten di Sumatera

Barat adalah sangat merata dibandingkan dengan pembangunan antar kota di propinsi Sumatera Barat.

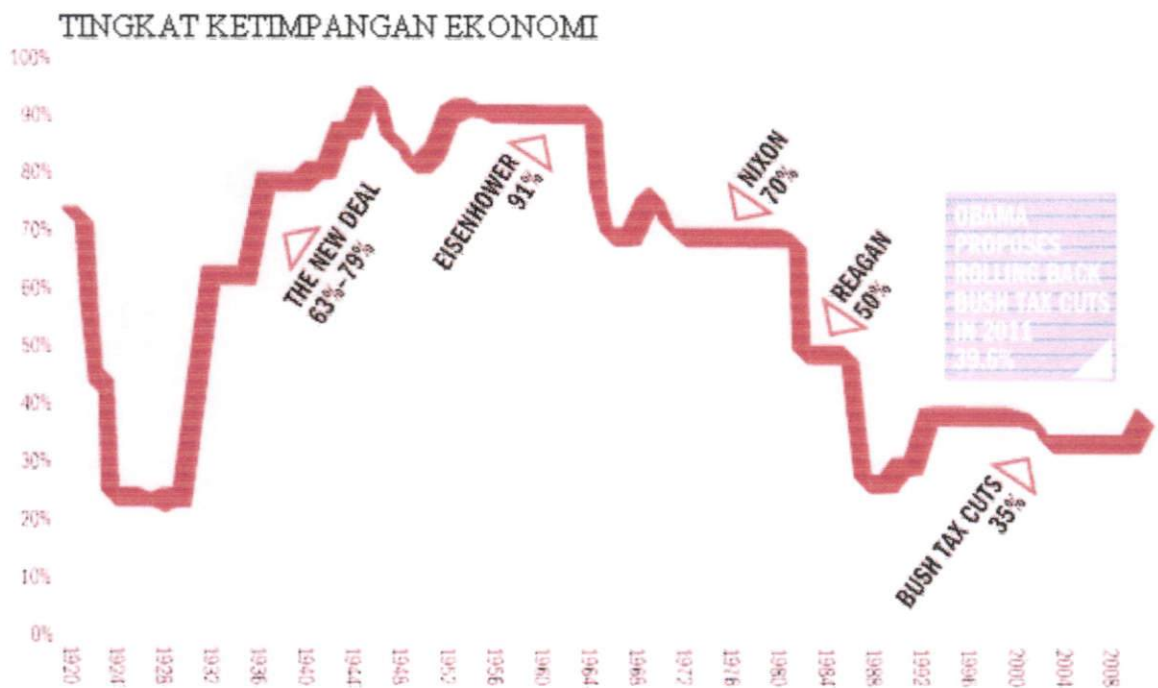
Ketimpangan yang cukup tinggi terlihat pada pembangunan ekonomi antar kota dengan indeks ketimpangan berkisar antara 0.329 – 0.398. variasi potensi ekonomi yang cukup besar merupakan sumber utama ekonomi yang cukup besar merupakan sumber utama ketimpangan. Kota yang bertumbuh cukup cepat adalah kota Padang yang berfungsi sebagai ibu kota propinsi.

Penelitian yang dilakukan oleh The Socialist Agenda Presented by the Socialist Central Committee, menjelaskan bahwa ada tiga bentuk ketimpangan ekonomi regional diantaranya adalah :

1. Wealth Disparity atau ketimpangan kekayaan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
2. Income Disparity atau ketimpangan pendapatan antar region.
3. Wage Disparity atau ketimpangan dari tingkat upah tenaga kerja.

Dalam penelitiannya menganalisis pengaruh perobahan system pemerintahan dan pimpinan Negara terhadap tingkat ketimpangan ekonmomi regional di Negara Amarika Serikat, dengan hasilnya dapat dilihat dari grafik sebagai berikut :

TINGKAT KETIMPANGAN EKONOMI REGIONAL DI NEGARA AMERIKA SERIKAT TAHUN 1920-2008



Grafik 2.2 Tingkat Ketimpangan Ekonomi Regional Di Negara Amerika Serikat Tahun 1920-2008

Sumber : The Socialist Agenda Presented by the Socialist Central Committee

Dari grafik dapat dijelaskan bahwa ketimpangan ekonomi regional di Negara Amerika Serikat telah mencapai puncak pada tahun 1944 yang disebut dengan tingkat ketimpangan ekonomi regional THE NEW DEAL, dengan tingkat ketimpangan mencapai 95%. Dan kemudian menurun sampai pada tahun 1988, dengan tingkat ketimpangan ekonomi regional sebesar 25%. Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut juga sejalan dengan hipotesa neo-klasik. Dalam hal ini kebijakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal seperti indikator pajak dan investasi pemerintah, sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional.

2.3 Hipotesa

Hipotesa yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga ada perbedaan keunggulan pada struktur ekonomi di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.
2. Diduga teori neo-klasik tentang ketimpangan ekonomi regional, berlaku juga di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.
3. Diduga terjadi ketimpangan perekonomian antar daerah atau kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.
4. Diduga faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi regional berpengaruh negatif terhadap ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Data Penelitian dan Sumber Data

Objek penelitian ini adalah wilayah penelitian yang meliputi seluruh populasi di dua propinsi yaitu yang ada di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2001-2008, yang meliputi untuk Propinsi Sumatera Barat yaitu ; Kepulauan mentawai, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Sawah Lunto/Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Limo Puluh Koto, Pasaman, Padang, Solok(Kota Solok), Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh. Sedangkan untuk Propinsi Sumatera Utara yaitu ; Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, Asahan, Simalingun, Dairi, Karo, Deli Serdang, Langkat, Sobolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Medan, dan Binjai. Dalam penelitian daerah ini digabungkan antara daerah baru atau pemekaran dengan daerah pusatnya. Untuk propinsi Sumatera Barat terdapat lima belas (15) daerah penelitian, sedangkan untuk propinsi Sumatera Utara terdapat Sembilan belas (19) daerah penelitian. Untuk daerah pecahannya dikategorikan pada satu pusat daerahnya saja. Sehingga daerah penelitian berjumlah tiga puluh empat (34) daerah penelitian atau sampel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi data pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2001-2008, kemudian juga digunakan data PDRB per kapita di kabupaten/kota Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara. Selain itu

juga digunakan variabel jumlah penduduk propinsi serta kabupaten/kota pada propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2001-2008. Untuk menghubungkan pengaruh faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional pada propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara, juga dibutuhkan data tentang kandungan sumber daya alam, data tentang kondisi demografis, data tentang kondisi mobilitas barang dan jasa serta alokasi dana pembangunan pada setiap kabupten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data-data sekunder yang bersumber utama dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah di publikasikan serta dari buku-buku serta karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan.

3.2 Pembentukan Model

Dalam penelitian ini, dianalisis tiga bentuk perumusan masalah yaitu ; analisa tingkat ketimpangan ekonomi regional di propinsi Sumatera dan propinsi Sumatera Utara, menganalisa hubungan antara faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi regional terhadap tingkat ketimpangan perekonomian di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara, serta impilikasi kebijakan ekonomi regional yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi regional.

Analisis yang digunakan untuk menganalisa tingkat ketimpangan perekonomian antara propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Sebagaimana yang di gunakan oleh Akita dan Alisyahbana (2002) dalam buku (Sjafrizal, 2008: 109), dalam studi yang dilakukan di Indonesia dipergunakan beberapa data yaitu PDRB Per kapita berdasarkan harga konstan 2000 untuk setiap kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat

dan Propinsi Sumatera Utara serta data tentang jumlah penduduknya, dengan menggunakan formula Theil Indeks sebagai berikut :

$$Td = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \{y_{ij}/Y\} \log [\{y_{ij}/Y\} / \{n_{ij}/N\}] (3.1)$$

Dimana :

- Td = Indeks Theil
- y_{ij} = PDRB per kapita kabupaten I di propinsi j
- Y = jumlah PDRB per kapita seluruh propinsi j
- n = jumlah penduduk kabupaten I di propinsi j
- N = jumlah penduduk seluruh kabupaten

Analisis tentang menganalisa hubungan antara faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi regional terhadap tingkat ketimpangan perekonomian di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Model yang dapat dibuat berdasarkan variable-variabel yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan tersebut dapat dituliskan secara matematik seperti berikut :

$$K = f (PTP + TPAK + PMM + DP) (3.2)$$

Dimana:

- K** : Ketimpangan Ekonomi Regional, (0-1)
- PTP** : Produktifitas Tanaman Padi, (Ton)
- TPAK** : Tingkat Partisipasi angkatan kerja, (persen)
- PMM** : Persentase Migrasi Masuk, (persen)
- DP** : Dana Perimbangan, (Rupiah)

Untuk menafsirkan hubungan antara variable-variabel yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antara daerah di propinsi Sumatera Barat dengan propinsi Sumatera Utara, maka digunakan persamaan ekonometrika regresi linear berganda yang dapat ditulis secara matematik seperti berikut :

$$K = \beta_0 + \beta_1 \text{PTP} + \beta_2 \text{TPAK} + \beta_3 \text{PMM} + \beta_4 \text{DP} + \varepsilon \dots\dots\dots (3.3)$$

Dimana:

- K** : Ketimpangan Ekonomi Regional, (0-1)
- PTP** : Produktifitas Tanaman Padi, (Ton)
- TPAK** : Tingkat Partisipasi angkatan kerja, (persen)
- PMM** : Persentase Migrasi Masuk, (persen)
- DP** : Dana Perimbangan, (Rupiah)
- β_0** : Konstanta
- β_{1-3}** : Koefisien dari variabel
- ε** : eror term

3.3 Definisi Operasional Variable

Analisis tentang menganalisis tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan indeks entropy theil. Yang dapat dilihat dari seberapa nilai dari (Td) tingkat ketimpangan dengan menggunakan indeks entropy theil.

Hasil penafsiran tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan formulasi

Theil Index (T_d) adalah, semakin mendekati nol (0), nilai tingkat ketimpangan ekonomi regional, maka semakin kecil tingkat ketimpangan yang terjadi pada daerah tersebut, dan sebaliknya semakin mendekati satu (1), nilai tingkat ketimpangan ekonomi regional, maka semakin besar tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi pada daerah tersebut.

Analisis tentang menganalisa tingkat hubungan antara faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi regional terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Definisi model berdasarkan variable-variabel yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan adalah sebagai berikut :

K (tingkat ketimpangan ekonomi regional), menunjukkan seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada daerah tersebut. Dimana semakin mendekati satu (1) nilai K, berarti ketimpangan ekonomi regional semakin tinggi, sebaliknya semakin mendekati nol (0) nilai K, berarti tingkat ketimpangan ekonomi regional semakin mengecil, variable ini dianalisa sebagai variabel dependent atau variabel terikat, dimana variabel tersebut dipengaruhi oleh variable independent atau variabel bebas sebagai berikut :

1. Produksi tanaman padi (Ton), sebagai indikator dari potensi kandungan sumber daya alam.

Hal ini dilakukan dengan landasan bahwa sektor ekonomi yang bisa dibandingkan adalah potensi dari produktifitas tanaman padi pada tiap-tiap kabupaten/kota yang ada di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Selain itu dalam penelitian sebelumnya, yang meneliti tentang sektor unggulan dengan metode sift share yang terjadi di pulau Sumatera yakni dari

penelitian mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan, Jeffri.G.M. (2009), menyatakan bahwa dari tahun 1991 sampai tahun 2008 dapat dinyatakan bahwa sektor yang berkembang pada periode tersebut adalah produktifitas tanaman padi. Semakin besar produktifitas tanaman padi yang dimiliki suatu daerah bisa dijadikan indikator dari kandungan sumber daya alam pada suatu daerah, akan mampu menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi regional pada daerah tersebut.

2. Tingkat partisipasi angkatan kerja (persentase), sebagai indikator dari kondisi demografis penduduk.

Hal ini merujuk kembali kepada argument dari buku Sjafrizal (2008), yang menyatakan bahwa kondisi demografis diperlihatkan oleh kondisi masyarakat tersebut dari segi kesehatan, pendidikan juga perbedaan kondisi ketenagakeraan. Maka indikator kondisi demografis yang dapat dikaji secara ekonomi yaitu dari sisi ketenaga kerjaan. Oleh karena itu digunakan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja dalam menganalisa tingkat kondisi demografis penduduk pada tiap-tiap kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, maka tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota tersebut akan dapat teratasi dengan baik.

3. Persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah, sebagai indikator dari kelancaran mobilitas barang dan jasa.

Variabel ini menunjukan hubungan suatu daerah dalam satu region yang saling mempengaruhi. Hal ini bisa dikaji dari tingkat perdagangan antar daerah dan

migrasi penduduk. Mengingat sulitnya mengolah data dari sektor perdagangan antar daerah yang tidak tercatat, maka kelancaran mobilitas barang dan jasa ini dianalisis dengan menggunakan variabel tingkat migrasi penduduk masuk ke daerah tersebut. Dengan migrasi penduduk masuk ke suatu daerah maka akan mengalirkan faktor produksi pada daerah tersebut baik labor (tenaga kerja) maupun kapital (modal), sehingga tingkat produktifitas pada daerah tersebut meningkat.

4. Dana perimbangan (rupiah), sebagai indikator dari dana pembangunan.

Dana perimbangan dari pemerintah sebagai sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan suatu daerah menjadi investasi yang akan meningkatkan sarana dan prasarana pada suatu daerah yang kemudian akan cenderung mendorong investasi swasta dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Semakin besar dana perimbangan yang dialokasikan pemerintah, maka tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota tersebut akan dapat teratasi dengan baik.

Dalam perumusan tersebut terdapat satu variabel terikat atau variabel dependent (Y), yaitu ketimpangan ekonomi regional. Dan terdapat empat variabel bebas atau variabel independent (X), yaitu produksi tanaman padi, persentase tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah serta dana perimbangan pada setiap kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Barat dan provinsi Sumatera Utara.

3.4 Teknik Pengolahan Data dan Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pada dua aspek penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Kuantitatif

Yaitu metode analisis data-data yang berupa nilai angka, yang dapat dijelaskan dengan menggunakan rumus-rumus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk menanalisis secara pasti dalam bentuk angka seberapa besar pengaruh masalah tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi pada propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.

2. Analisis Kualitatif

Yaitu metode analisis data-data yang berupa nilai non-angka, yang dapat dijelaskan dengan membuat suatu keterangan atau penjelasan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

3. Metode Analisis Kuantitatif deskriptif

Yaitu metode pengolahan data yang bersifat angka, dan memerlukan penjelasan. Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian analisis kuantitatif deskriptif, hal ini bertujuan agar data yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam penelitian ini, dapat dipergunakan beberapa teknik analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yang meliputi sebagai berikut :

1. Teknik menganalisa seberapa besar tingkat ketimpangan perekonomian yang terjadi antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara

Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota yang terjadi di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2001-2008, dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (regional inequality) yang dinamakan dengan formula Theil Indeks. Formula ini digunakan dengan tujuan untuk lebih dapat mengetahui secara sekaligus ketimpangan pembangunan antar propinsi dan antara kabupaten/kota, mengingat ketimpangan pembangunan pada tingkat propinsi berkaitan langsung dengan ketimpangan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota, maka pengukuran ketimpangan dengan menggunakan Theil Index ini sangat penting artinya dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut (Sjafrizal 2008: 115).

2. Teknik yang digunakan untuk menganalisis bagaimana hubungan antara faktor yang menyebabkan ketimpangan ekonomi regional terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.

Menurut Sjafrizal, 2008: 111, menyatakan bahwa ada lima faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah yaitu : (a) perbedaan kandungan sumber daya alam, (b) perbedaan kondisi demografis, (c) kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, (d) tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan (e) Alokasi dana pembangunan antar wilayah. Dan pada penelitian ini dianalisis seberapa besar pengaruh faktor-faktor

penyebab ketimpangan ekonomi regional yaitu, Produksi tanaman padi (Ton), sebagai indikator dari potensi kandungan sumber daya alam, Tingkat partisipasi angkatan kerja (persentase), sebagai indikator dari kondisi demografis penduduk, persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah (persentase), sebagai indikator dari kelancaran mobilitas barang dan jasa, serta dana perimbangan (rupiah), sebagai indikator dari dana pembangunan. Akan dianalisis pengaruhnya terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.

Nilai tersebut dipertimbangkan sesuai dengan hubungan yang telah di analisis pada teknik pembahasan pokok permasalahan pertama. Data yang digunakan dalam regresi berupa Pooling data yaitu dengan memperlihatkan data satu tahun dari masing-masing Kabupaten/kota yang ada di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara, yang bertujuan untuk memudahkan penulis dalam mengolah data tersebut. Pooling data yang digunakan agar hasil regresi lebih jelas menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk pengolahan data atau meregresi dilakukan dengan menggunakan model SPSS 16.0.

3.5 Uji Statistika

3.5.1 Uji Determinasi (R^2)

Untuk model dengan lebih dari satu variabel bebas, maka korelasi antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas disebut dengan *multiple korelasi*. Kuadrat dari koefisien multiple korelasi disebut *koefisien determinasi*. Uji determinasi digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 terletak antara 0 - 1, semakin tinggi nilai R^2 yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan variabel independent menerangkan variabel dependent.

3.5.2 Uji t-test

Uji t-test merupakan pengujian pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent. Pengujian dilakukan melalui perbandingan koefisien regresi masing-masing variabel independent (t-hitung) terhadap t-tabel. Apabila t-hitung berada diluar daerah kritik dimana t-hitung lebih kecil dari min t-tabel atau t-hitung lebih besar dari t-tabel ($\min t\text{-tabel} > t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak, berarti koefisien regresi variabel independent secara signifikan mempengaruhi variabel dependent. Sebaliknya, jika t-hitung berada pada daerah kritik dimana t-hitung lebih besar dari min t-tabel atau t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($\min t\text{-tabel} < t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$), maka hipotesis nol (H_0) diterima, berarti koefisien regresi variabel independent tidak signifikan mempengaruhi variabel dependent.

3.5.3 Uji F-test

Uji F-test digunakan untuk menguji keseluruhan variabel sekaligus sebagai penerang bagi variabel tidak bebas. Rumus F-test adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R)^2 / (n-k)} \dots\dots\dots (3.4)$$

Dimana:

F = Nilai mutlak pengujian

n = Jumlah data yang dianalisis

k = Jumlah parameter

R^2 = Koefisien determinasi

Selanjutnya akan dibandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. Apabila F-hitung lebih besar daripada F-tabel maka seluruh variabel independent yang diuji berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent. Sebaliknya, apabila F-hitung lebih kecil daripada F-tabel, maka variabel independent tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent.

3.5.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolinearitas diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dalam penelitian ini, dapat diketahui dengan cara melihat; (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Operasionalnya, setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregres terhadap variabel independen lainnya.

3.5.5 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas, yaitu keadaan dimana variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (Ghozali: 2005). Uji Heteroskedastisitas yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan grafik Scatterplot. Uji grafik dilakukan dengan membaca pola Scatterplot. Apabila titik-titik membentuk pola tertentu pada Scatterplot, maka dapat disimpulkan terdapat heteroskedastisitas dan model regresi harus diperbaiki.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TINGKAT KETIMPANGAN EKONOMI REGIONAL SERTA FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

4.1 Tingkat Ketimpangan

Propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara merupakan dua daerah yang berbeda, dimana dari hipotesa awal dapat dikatakan tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang jauh lebih besar dari pada Propinsi Sumatera Barat, namun propinsi Sumatera Utara masih memiliki tingkat ketimpangan ekonomi regional yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat ketimpangan yang terjadi di propinsi Sumatera Barat. Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi penulis dan menjadikan dasar bagi penulis untuk memilih daerah yang akan diperbandingkan yaitu daerah propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara, dimana pada akhirnya dapat mengimplementasikan kebijakan yang tepat dalam menanggulangi tingkat ketimpangan ekonomi regional yang terjadi antar Kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.

Tingkat ketimpangan ekonomi regional di propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara dihitung dari seberapa besar nilai PDRB perkapita tahun 2001-2008 menurut harga konstan tahun 2000, PDRB kedua propinsi tahun 2001-2008 menurut harga konstan tahun 2000, jumlah penduduk pada kabupaten/kota tahun 2001-2008 serta jumlah penduduk pada kedua propinsi tersebut tahun 2001-2008. Berikut ini merupakan data PDRB per kapita propinsi Sumatera Barat tahun 2001-2008 menurut harga konstan tahun 2000 :

TABEL 4.1

PDRB perkapita Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001-2008 Menurut Harga Konstan

Tahun 2000

DAERAH	PDRB PERKAPITA							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kep mentawai	6,337,470	7,335,348	7,678,277	8,431,860	10,267,723	12,012,000	13,580,000	16,150,000
Pesisir selatan	3,692,613	4,023,356	4,227,397	4,640,905	5,375,206	6,178,000	7,072,000	8,095,000
Solok selatan	4,180,729	4,766,664	5,142,242	6,001,245	7,115,276	8,317,000	9,731,000	11,416,000
S.Lunto/Sijunjung	5,385,394	6,017,285	6,240,947	7,047,666	8,131,050	9,433,000	10,487,000	11,969,000
Tanah datar	5,324,237	6,014,072	6,552,699	7,186,462	8,603,516	10,156,000	11,382,000	12,999,000
Padang pariaman	5,002,638	5,763,011	5,736,432	6,317,507	7,883,815	10,189,000	11,396,000	13,245,000
Agam	4,812,861	5,450,935	6,002,427	6,703,815	7,948,471	9,197,000	10,418,000	12,111,000
Limo puluh koto	5,990,603	6,704,290	7,250,845	8,099,199	9,487,304	11,156,000	12,736,000	15,137,000
Pasaman	5,087,631	5,717,054	6,073,124	5,334,038	6,507,461	7,671,000	8,826,000	10,070,000
Padang	11,075,279	12,652,494	12,385,324	14,620,525	16,576,536	18,657,000	20,722,000	23,487,000
Solok	7,315,152	8,105,642	8,224,668	9,059,451	10,551,025	12,115,000	13,249,000	15,188,000
Sawah lunto	9,003,959	975,774	9,853,393	10,758,344	11,793,581	12,705,000	13,897,000	15,751,000
Padang panjang	6,786,047	7,670,083	8,175,187	9,060,008	9,664,059	11,033,000	11,970,000	13,467,000
Bukit tinggi	7,312,582	8,116,516	8,425,365	9,178,003	10,786,006	12,375,000	13,768,000	16,022,000
Payakumbuh	5,677,553	6,509,115	6,974,747	7,775,338	9,234,548	10,885,000	12,195,000	14,286,000
JUMLAH	92,984,749	95,821,639	108,943,073	120,214,365	139,925,577	162,079,000	181,429,000	209,393,000

Sumber : PDRB Perkapita Kabupaten/kota propinsi Sumatera Barat Atas harga Konstan 2000, BPS Kota Padang, Data Diolah.

Propinsi Sumatera Barat terdiri dari beberapa kabupaten/kota yang menjalankan perekonomian dengan cara dan strategi berbeda-beda. Setiap Kabupaten/Kota juga memberikan sumbangsih bagi perekonomian yang tidak sedikit. Setiap kabupaten/kota, mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode tahun 2001-2008, secara umum PDRB perkapita

kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat atas harga konstan tahun 2000 menunjukkan adanya peningkatan, dimana pada tahun 2001 total nilai PDRB Sumatera Barat sebesar Rp. 92.984.749 menjadi sebesar Rp. 209.393.000juta pada tahun 2008, (Sumber : BPS Kota Padang 2011).

Sedangkan peningkatan PDRB perkapita atas harga konstan 2000 pada setiap kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat, kabupaten/kota yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB perkapita atas harga konstan 2000 adalah kota Padang yaitu sebesar Rp. 11.075.279,00 pada tahun 2001 dan meningkat menjadi Rp. 23.487.000,00 pada tahun 2008. Pada propinsi Sumatera Barat kabupaten atau kota yang memilki kontribusi terkecil terhadap PDRB adalah kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebesar Rp. 3.692.612,5 pada tahun 2008, (sumber : BPS Kota Padang 2011).

TABEL 4.2

PDRB Perkapita Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001-2008 Menurut Harga Konstan

Tahun 2000

DAERAH	PDRB PERKAPITA							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Nias	3,271,709	3,793,688	4,307,071	4,861,036	4,888,629	6,248,000	7,190,000	8,268,000
M.Natal	3,506,286	3,867,809	4,369,299	4,727,153	4,939,939	5,464,000	6,235,000	7,281,000
T. Selatan	3,929,813	4,472,648	5,025,391	5,427,688	5,859,948	6,679,000	7,236,000	9,698,000
T.Tengah	2,981,930	3,353,684	3,736,261	4,143,009	4,481,774	4,882,000	5,252,000	5,749,000
T.Utara	4,402,626	5,052,537	6,062,064	6,838,788	8,408,548	9,431,000	10,349,000	11,682,000
Toba.Samosir	5,424,845	6,237,834	10,359,541	11,104,918	11,729,944	12,542,000	14,265,000	15,982,000
L.Batu	8,229,816	8,803,103	9,618,574	11,514,786	12,892,745	12,758,000	14,218,000	16,174,000
Asahan	9,685,198	10,737,520	12,824,628	14,375,987	15,156,520	6,991,000	12,151,000	13,872,000
Simalungun	5,172,938	5,666,712	6,286,471	6,812,099	7,423,633	8,181,000	9,036,000	9,864,000
Dairi	5,385,963	6,065,709	6,802,321	7,928,545	8,644,227	9,538,000	10,641,000	6,305,000
Karo	8,129,852	8,810,317	9,739,895	10,471,676	11,053,052	11,615,000	12,760,000	14,018,000
Deli Serdang	6,311,720	7,801,445	8,790,622	10,189,228	12,348,601	13,132,000	15,443,000	17,324,000
Langkat	6,010,330	6,353,514	7,028,627	7,705,527	8,476,289	9,750,000	11,150,000	12,703,000
Sibolga	5,990,086	6,660,756	7,472,052	8,235,156	9,122,437	10,242,000	11,536,000	13,054,000
T. Balai	7,236,581	8,075,142	9,289,435	10,547,967	11,556,011	12,607,000	13,940,000	15,151,000
P. Siantar	6,373,169	7,171,019	8,439,190	11,053,699	11,457,267	11,683,000	13,079,000	14,486,000
T.Tinggi	3,271,709	3,793,688	4,307,071	4,861,036	4,888,629	6,248,000	7,190,000	8,268,000
Medan	3,506,286	3,867,809	4,369,299	4,727,153	4,939,939	5,464,000	6,235,000	7,281,000
Binjai	3,929,813	4,472,648	5,025,391	5,427,688	5,859,948	6,679,000	7,236,000	9,698,000
JUMLAH	2,981,930	3,353,684	3,736,261	4,143,009	4,481,774	4,882,000	5,252,000	5,749,000

Sumber : PDRB Perkapita Kabupaten/kota propinsi Sumatera Utara Atas harga Konstan 2000, BPS Kota Padang 2011, Data Diolah.

Propinsi Sumatera Utara terdiri dari beberapa kabupaten/kota yang menjalankan perekonomian dengan cara dan strategi berbeda-beda. Setiap Kabupaten/Kota juga memberikan sumbangsih bagi perekonomian yang tidak sedikit. Setiap

kabupaten/kota, mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode tahun 2001-2008, secara umum PDRB perkapita kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara atas harga konstan tahun 2000 menunjukkan adanya peningkatan, dimana pada tahun 2001 total nilai PDRB Sumatera Barat sebesar Rp. 115.345.315,00 menjadi sebesar Rp. 250.645.000.000,00 pada tahun 2008, (Sumber : BPS Kota Padang 2011).

Sedangkan peningkatan PDRB perkapita atas harga konstan 2000 pada setiap kabupaten/kota di propinsi Sumatera Utara, kabupaten/kota yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB perkapita atas harga konstan 2000 adalah kota Medan yaitu sebesar Rp. 11.287.751,00 pada tahun 2001 dan meningkat menjadi Rp. 31.027.000,00 pada tahun 2008. Pada propinsi Sumatera Barat kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terkecil terhadap PDRB adalah daerah Tapanuli Tengah yaitu sebesar Rp. 5.749.000,00 pada tahun 2008, (sumber : BPS Kota Padang 2011).

Menurut (Budiono, 1999: 1), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Disini jelas bahwa ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu Output total (PDRB) dan sisi jumlah penduduk. Berikut ini merupakan data tentang pertumbuhan penduduk di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara :

TABEL 4.3

Data Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun
2001-2008

DAERAH	JUMLAH PENDUDUK							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kep mentawai	4,860	62,010	66,300	67,375	64,540	66,332	66,332	68,097
Pesisir selatan	348,480	402,420	415,000	417,106	423,093	429,647	429,647	442,257
Solok selatan	435,950	450,040	454,900	457,389	342,930	347,288	347,288	355,705
S.Lunto/Sijunjung	311,580	319,890	337,200	343,819	188,317	192,997	192,997	202,275
Tanah datar	320,960	332,700	333,600	339,216	331,576	334,258	334,258	335,926
Padang pariaman	426,990	443,820	442,400	375,538	378,208	318,803	318,803	387,195
Agam	414,930	427,590	425,100	428,433	424,789	426,767	426,767	429,822
Limo puluh koto	311,820	320,370	322,200	324,258	324,201	327,203	327,203	331,771
Pasaman	514,990	535,290	547,300	555,486	244,554	322,356	322,356	257,374
Padang	720,780	743,220	764,800	784,740	799,736	819,765	819,765	856,815
Solok	48,680	50,000	52,800	55,709	54,049	55,784	55,784	58,473
Sawah lunto	50,750	51,760	52,600	53,837	53,081	53,327	53,327	54,907
Padang panjang	40,860	41,600	42,800	44,699	45,439	49,773	49,773	54,218
Bukit tinggi	92,450	93,660	97,800	100,254	100,512	102,515	102,515	106,045
Payakumbuh	98,440	100,710	102,100	104,377	101,819	104,084	104,084	105,994
JUMLAH	4,142,520	4,375,080	4,456,900	4,452,236	3,876,844	3,950,899	3,950,899	4,452,236

Sumber : Data Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001-2008, BPS Kota Padang 2011, Data Diolah.

Dilihat dari sisi jumlah penduduk Propinsi Sumatera Barat terjadi peningkatan sepanjang periode pengamatan yaitu sebesar 4.452.236 jiwa pada tahun 2001 menjadi sebesar 4.697.464 jiwa pada tahun 2008. Pada propinsi Sumatera Barat yang mempunyai jumlah penduduk terbesar adalah kota Padang dengan jumlah penduduk mencapai 856.815 jiwa pada tahun 2008 dan jumlah penduduk terkecil adalah pada

kabupaten Mentawai yaitu sebesar 68.097 jiwa pada tahun 2008, (Sumber data : BPS Kota Padang 2011).

TABEL 4.4

Data Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2008

DAERAH	JUMLAH PENDUDUK							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Nias	699,148	698,994	422,170	441,807	441,807	442,061	442,559	4,434,809
Mandailing Natal	386,400	367,990	369,691	386,807	386,807	413,799	417,642	423,706
Tapanuli Selatan	749,003	761,205	596,188	626,702	626,702	629,136	325,042	263,766
Tapanuli Tengah	249,668	270,600	272,333	286,035	286,035	294,399	307,692	314,663
Tapanuli Utara	407,831	407,581	255,162	256,201	256,201	256,389	263,697	267,591
Toba Samosir	306,373	258,615	285,586	158,677	158,677	169,112	169,296	171,818
Labuhan Batu	863,438	905,258	910,502	951,773	951,773	987,145	1,007,174	2,882,775
Asahan	943,822	987,244	990,230	1,024,369	1,024,369	1,038,621	676,570	688,509
Simalungun	863,679	808,210	808,288	826,101	826,101	841,217	846,282	853,102
Dairi	295,323	289,323	255,847	261,287	261,287	267,666	268,772	493,894
Karo	287,854	305,452	306,869	316,207	316,207	342,574	351,332	360,893
Deli Serdang	2,021,021	2,041,121	2,054,707	1,569,638	1,569,638	1,634,100	1,686,330	1,738,455
Langkat	921,911	936,925	940,601	970,433	970,433	1,013,846	1,027,354	1,042,588
Sibolga	84,034	85,100	85,505	88,717	88,717	845,831	93,187	94,607
Tanjung Balai	136,621	143,836	144,979	152,814	152,814	156,500	159,971	163,686
Pematang Siantar	254,099	223,824	223,949	230,487	230,487	235,385	236,639	238,782
Tebing Tinggi	699,148	698,994	422,170	441,807	441,807	442,061	442,559	4,434,809
Medan	386,400	367,990	369,691	386,807	386,807	413,799	417,642	423,706
Binjai	749,003	761,205	596,188	626,702	626,702	629,136	325,042	263,766
JUMLAH	249,668	270,600	272,333	286,035	286,035	294,399	307,692	314,663

Sumber : Data Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2008, BPS Kota Padang 2011, Data Diolah.

Dilihat dari sisi jumlah penduduk Propinsi Sumatera Utara terjadi peningkatan sepanjang periode pengamatan yaitu sebesar 11.749.395 jiwa pada tahun 2001 menjadi sebesar 16.929.447 jiwa pada tahun 2008. Pada propinsi Sumatera utara yang mempunyai jumlah penduduk terbesar adalah kota Medan dengan jumlah penduduk mencapai 2.102.105 jiwa pada tahun 2008 dan jumlah penduduk terkecil adalah pada kota sibolga sebesar 94.607 jiwa pada tahun 2008, (Sumber data : BPS Kota Padang 2011).

Dara data-data diatas dapat hitung seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada kabupaten/kota yang ada di propinsi Sumatera Barat dengan propinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2001-2008 dengan menggunakan Indeks Theil sebagaimana pada pembahasan bab III pada rumusan 3.1, sebagai formula dalam menghitung tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabuten/kota di propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara. Sebagaimana yang digunakan oleh Akita dan Alisyahbana (2002) dalam buku (Sjafrizal, 2008: 109), dalam studi yang dilakukan di Indonesia dipergunakan beberapa data yaitu PDRB Per kapita untuk setiap wilayah serta data tentang jumlah penduduk, dengan formula Theil Indeks, maka dapat ditentukan tingkat ketimpangan yang terjadi sebagai berikut :

TABEL 4.5

Data Tingkat Ketimpangan Ekonomi Regional Antar Kabupaten/Kota Propinsi
Sumatera Barat Dan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2008

NO	DAERAH	TINGKAT KETIMPANGAN								Rata- Rata
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
1	Kep mentawai	0.153	0.056	0.048	0.047	0.047	0.048	0.049	0.048	0.062
2	Pesisir selatan	0.012	0.014	0.015	0.015	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016
3	Solok selatan	0.016	0.016	0.016	0.016	0.012	0.012	0.012	0.012	0.014
4	S.Lunto/Sijunjung	0.002	0.004	0.007	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005
5	Tanah datar	0.003	0.005	0.006	0.006	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007
6	Padang pariaman	0.013	0.014	0.014	0.011	0.013	0.007	0.012	0.007	0.011
7	Agam	0.013	0.013	0.013	0.013	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014
8	Limo puluh koto	0.001	0.001	0.002	0.002	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004
9	Pasaman	0.018	0.019	0.019	0.020	0.006	0.011	0.006	0.011	0.014
10	Padang pariaman	0.012	0.014	0.020	0.020	0.029	0.029	0.030	0.029	0.023
11	Solok	0.087	0.074	0.061	0.059	0.055	0.054	0.052	0.054	0.062
12	Sawah lunto	0.115	0.001	0.080	0.078	0.067	0.060	0.058	0.060	0.065
13	Padang panjang	0.084	0.074	0.067	0.066	0.053	0.050	0.046	0.050	0.061
14	Bukit tinggi	0.060	0.051	0.042	0.040	0.036	0.036	0.035	0.036	0.042
15	Payakumbuh	0.037	0.032	0.029	0.029	0.026	0.027	0.027	0.027	0.029
16	Nias	0.009	0.010	0.003	0.004	0.005	0.002	0.004	0.002	0.005
17	Mandailing Natal	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002
18	Tapanuli Selatan	0.009	0.010	0.007	0.008	0.008	0.006	0.001	0.006	0.007
19	Tapanuli Tengah	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002	0.000	0.001
20	Tapanuli Utara	0.002	0.001	0.010	0.009	0.012	0.017	0.012	0.017	0.010
21	Toba Samosir	0.012	0.016	0.030	0.041	0.039	0.042	0.038	0.042	0.032
22	Labuhan Batu	0.001	0.027	0.006	0.007	0.007	0.007	0.011	0.007	0.009
23	Asahan	0.002	0.002	0.001	0.004	0.005	0.014	0.004	0.014	0.006
24	Simalungun	0.010	0.009	0.010	0.011	0.011	0.009	0.012	0.009	0.010
25	Dairi	0.013	0.012	0.014	0.014	0.013	0.016	0.013	0.016	0.014
26	Karo	0.032	0.027	0.025	0.020	0.018	0.019	0.013	0.019	0.022
27	Deli Serdang	0.027	0.029	0.029	0.022	0.022	0.021	0.025	0.021	0.024
28	Langkat	0.009	0.011	0.012	0.013	0.013	0.012	0.014	0.012	0.012
29	Sibolga	0.045	0.043	0.041	0.038	0.038	0.007	0.039	0.047	0.032
30	Tanjung Balai	0.046	0.043	0.042	0.041	0.039	0.044	0.038	0.044	0.042
31	Pematang Siantar	0.023	0.025	0.025	0.032	0.028	0.028	0.024	0.028	0.027
32	Tebing Tinggi	0.036	0.033	0.031	0.028	0.029	0.034	0.030	0.034	0.032

33	Medan	0.022	0.025	0.025	0.028	0.025	0.019	0.026	0.019	0.023
34	Binjai	0.023	0.022	0.022	0.021	0.021	0.028	0.024	0.028	0.024

Sumber : *Data Tingkat Ketimpangan Ekonomi Regional Antar Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat Dan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2008, Bps Kota Padang 2011, Data Diolah.*

Dari data yang telah dihitung menggunakan formula indeks theil tersebut didapatkan nilai ketimpangan ekonomi regional yang terjadi antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Dimana dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota propinsi Sumatera Barat jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota propinsi Sumatera Utara. Tingkat ketimpangan ekonomi regional yang tertinggi pada propinsi Sumatera barat terjadi pada kabupaten Sawah Lunto sebesar 0.115 pada tahun 2001 dan terendah pada kabupaten Limo Puluh Koto sebesar 0.001 pada tahun 2001. Sedangkan pada propinsi Sumatera Utara, tingkat ketimpangan ekonomi regional yang tertinggi pada propinsi Sumatera Utara terjadi pada Tanjung Balai sebesar 0.046 pada tahun 2001 dan terendah pada kabupaten Labuhan Batu sebesar 0.001 pada tahun 2001.

4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Ekonomi Regional

4.2.1 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi kandungan sumber daya alam merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan dari suatu daerah dan merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kandungan sumber daya alam pada suatu daerah dengan daerah lain bersifat berbeda-beda, ada daerah yang besar potensi sumber daya alamnya dan ada pula daerah yang memiliki sedikit sekali sumber daya alamnya. Demikian juga dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah, Sjafrizal, 2008: 117.

Sehubungan dengan potensi sumber daya alam yang bisa diperbandingkan antara Kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara yaitu tingkat potensi kandungan sumber daya alam yang bersumber dari lahan pertanian. Dimana yang menjadi indikator dari nilai potensi kandungan sumber daya alam dari lahan pertanian adalah tingkat produktifitas tanaman padi baik padi ladang maupun padi sawah antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.

Daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih tinggi maka, daerah tersebut akan dapat memproduksi suatu komoditi dengan biaya yang lebih efisien. Sehingga mendapat keuntungan yang lebih besar dan produktifitas yang lebih tinggi. Sedangkan pada daerah yang sedikit memiliki kandungan sumber daya alam akan mengalami masalah biaya yang tidak efisien dalam memproduksi suatu komoditi, sehingga keuntungan yang didapatkan menjadi lebih kecil.

Untuk lebih memudahkan penulis dalam menganalisa dan dikarenakan keterbatasan dalam memperoleh data, maka penulis mengambil data potensi produksi pertanian tanaman padi, baik padi sawah maupun padi ladang pada setiap kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara dalam satu tahun saja yaitu tahun 2008. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL 4.6

Produktifitas Padi Sawah/Padi Ladang Menurut Kabupaten/Kota Propinsi
Sumatera Barat Dan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008
(Dalam Satuan Ton)

NO	DAERAH	Produktifitas Padi Tahun 2008
1	Kep mentawai	1.481
2	Pesisir selatan	100.222
3	Solok selatan	151.212
4	Sawah lunto/Sijunjung	698.971
5	Tanah datar	664.486
6	Padang pariaman	674.607
7	Agam	105.014
8	Limo puluh koto	689.852
9	Pasaman	166.407
10	Padang	26.758
11	Solok	13.216
12	Sawah lunto	1.365
13	Padang panjang	1.454
14	Bukit tinggi	21.064
15	Payakumbuh	30.826
16	Nias	715.061
17	Mandailing Natal	706.597
18	Tapanuli Selatan	678.787
19	Tapanuli Tengah	721.667
20	Tapanuli Utara	100.594
21	Toba Samosir	9.038
22	Labuhan Batu	665.179
23	Asahan	128.979
24	Simalungun	651.858
25	Dairi	101.758

26	Karo	97.401
27	Deli Serdang	35.033
28	Langkat	162.956
29	Sibolga	0
30	Tanjung Balai	1.412
31	Pematang Siantar	30.542
32	Tebing Tinggi	26.471
33	Medan	85.999
34	Binjai	30.623
JUMLAH		8.296.890

Sumber : Produktifitas Padi Sawah/Padi Ladang Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat Dan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 (Dalam Satuan TON), BPS Kota Padang 2011, Data Diolah.

Data diatas merupakan data hasil atau produktifitas padi baik padi ladang maupun padi sawah pada tahun 2008. Dimana dipilih produktifitas tanaman padi dikarenakan oleh pada kabupaten/kota dikedua propinsi yaitu propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian. Pada setiap kabupaten/kota memiliki produktifitas yang berbeda-beda, ada yang tinggi pada daerah Nias sebesar 715.061 Ton, ada yang sedang dan ada yang tidak ada sama sekali yaitu daerah sibolga, dimana letak dari daerah sibolga tersebut tidak berpotensi sama sekali dalam sektor pertanian. Jumlah dari total produktifitas padi di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara adalah sebesar 8.296.890 Ton pada tahun 2008. Dari hasil atau produktifitas padi pada kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara tersebut dapat dijadikan sebagai indikator dari potensi sumber daya alam yang dimiliki pada kabupaten/kota propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini data tentang Potensi kandungan sumber daya dengan potensi produksi pertanian tanaman padi, baik padi sawah maupun padi ladang sebagai indikator yang akan dianalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara pada tahun 2008.

4.2.2 Kondisi Demografis

Faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional adalah perbedaan kondisi demografis pada setiap kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara, dimana jika terdapat kondisi demografis yang menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, maka tingkat ketimpangan ekonomi pada suatu daerah tersebut dapat ditanggulangi. Kondisi demografis adalah perbedaan yang meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan, struktur kependidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, serta perbedaan dalam bertingkah laku dan kebiasaan atau etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat pada daerah yang bersangkutan, (Sjafrizal, 2008: 118).

Dimana kondisi demografis tersebut akan dapat mempengaruhi ketimpangan ekonomi regional, berpengaruh dari produktifitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik cenderung mempunyai produktifitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal tersebut akan mendorong peningkatan investasi dan selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut.

Adapun yang menjadi indikator bagi penulis untuk mengukur seberapa besar tingkat kondisi demografis yang baik dalam mengatasi terjadinya ketimpangan ekonomi regional yang semakin buruk antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara adalah seberapa besar tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada daerah tersebut. Berikut ini adalah data tingkat partisipasi angkatan kerja menurut kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

TABEL 4.7

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Di Propinsi

Sumatera Barat Dan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008

(Dalam satuan %)

NO	DAERAH	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
1	Kep mentawai	50.89
2	Pesisir selatan	60.14
3	Solok selatan	60.47
4	Sawah lunto/Sijunjung	75.37
5	Tanah datar	61.96
6	Padang pariaman	72.82
7	Agam	60.31
8	Limo puluh koto	73.43
9	Pasaman	61.01
10	Padang	53.71
11	Solok	49.37
12	Sawah lunto	49.26
13	Padang panjang	50.15
14	Bukit tinggi	52.09
15	Payakumbuh	55.08
16	Nias	86.04
17	Mandailing Natal	85.45
18	Tapanuli Selatan	72.23
19	Tapanuli Tengah	90.93
20	Tapanuli Utara	60.17
21	Toba Samosir	50.26
22	Labuhan Batu	72.01
23	Asahan	60.33
24	Simalungun	61.02
25	Dairi	60.22
26	Karo	60.12
27	Deli Serdang	56.28
28	Langkat	60.49
29	Sibolga	63.33
30	Tanjung Balai	50.61
31	Pematang Siantar	54.3
32	Tebing Tinggi	52.87

33	Medan	60.11
34	Binjai	54.34

Sumber : Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat Dan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 (Dalam satuan %), BPS Kota Padang 2011, Data Diolah.

Data diatas merupakan data tingkat partisipasi angkatan kerja menurut kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara pada tahun 2008. Dimana digunakan sebagai indikator dari kondisi demografis pada tiap-tiap kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Daerah yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang tertinggi adalah daerah Sawah Lunto/Sijunjung sebesar 75.37 %. Dan terendah dialami oleh daerah Solok sebesar 49.37%.

Dalam hal ini data tentang perbedaan kondisi demografis dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebagai indikator yang akan dianalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara pada tahun 2008.

4.2.3 Mobilitas Barang dan Jasa

Kelancaran mobilitas barang dan jasa pada suatu daerah juga sangat mempengaruhi kemajuan suatu daerah serta akan mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota pada daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi cenderung jauh lebih cepat pada daerah yang memiliki tingkat kelancaran mobilitas barang dan jasa yang baik. Dimana kelancaran mobilitas barang dan jasa dapat dilihat dari kegiatan perdagangan yang terjadi antar daerah, (Sjafrizal, 2008: 119). Selain dari perdagangan, kelancaran mobilitas barang dan jasa juga dapat dilihat dari tingkat migrasi yang terjadi pada suatu daerah ke daerah lain baik itu migrasi yang disponsori pemerintah, maupun migrasi spontan.

Dalam pertumbuhan ekonomi regional, mobilitas barang dan jasa merupakan variabel yang membedakan antara pertumbuhan ekonomi pada biasanya dengan pertumbuhan ekonomi regional. Dimana dalam ekonomi regional terdapat pengaruh ruang (space) menjadi sangat penting dalam perekonomian.

Maka dalam hal ini kelancaran mobilitas barang dan jasa di analisis dengan menggunakan indikator persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah. Dengan migrasi penduduk pada suatu daerah maka akan mengalirkan faktor produksi pada daerah tersebut baik labor (tenaga kerja) maupun kapital (modal), sehingga tingkat produktifitas pada daerah tersebut meningkat. Maka dari itu penulis menyertakan variabel dari data tentang persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah menurut kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara tahun 2008 sebagai berikut :

TABEL 4.8

Data Persentase Migrasi Penduduk Masuk Ke Suatu Daerah Menurut
Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat Dan Propinsi Sumatera Utara Tahun

2008

(Dalam satuan jiwa dan %)

NO	Kabupaten kota	Penduduk	Penduduk	Total	Persentase
		Non Migran	Migran Masuk	Jumlah Penduduk	Migrasi Masuk
		(jiwa)	(jiwa)	(jiwa)	(%)
1	Kep mentawai	62863	5304	68169	7.78
2	Pesisir selatan	420717	108522	442767	24.51
3	Solok selatan	414982	131034	438975	29.85
4	S.Lunto/Sijunjung	244104	113428	307810	36.85
5	Tanah datar	316690	116795	336102	34.75
6	Padang pariaman	406994	155415	432790	35.91
7	Agam	383396	113766	430119	26.45
8	Limo puluh koto	312288	121203	331971	36.51
9	Pasaman	467222	157082	513674	30.58
10	Padang	615853	158245	855379	18.5
11	Solok	37563	2520	58473	4.31
12	Sawah lunto	45077	1783	54867	3.25
13	Padang panjang	33580	3488	54077	6.45
14	Bukit tinggi	64013	27287	105764	25.8
15	Payakumbuh	79745	23410	105832	22.12
16	Nias	4310839	1713610	4434809	38.64
17	Mandailing Natal	390117	163431	423068	38.63
18	Tapanuli Selatan	649231	242939	689188	35.25
19	Tapanuli Tengah	257702	127470	314663	40.51
20	Tapanuli Utara	259626	70131	275998	25.41
21	Toba Samosir	282134	38137	304125	12.54
22	Labuhan Batu	2261603	1007242	2882775	34.94
23	Asahan	804961	26900024	935653	2875
24	Simalungun	770199	293705	855783	34.32
25	Dairi	444670	125971	491883	25.61
26	Karo	320587	83438	360893	23.12
27	Deli Serdang	1517532	441813	1959258	22.55
28	Langkat	929927	314028	1042588	30.12
29	Sibolga	58192	33917	94607	35.85
30	Tanjung Balai	121693	17023	163373	10.42

31	Pematang Siantar	173517	49648	241480	20.56
32	Tebing Tinggi	98618	25083	140917	17.8
33	Medan	1528837	473394	2102105	22.52
34	Binjai	189937	54431	252231	21.58
Total					3,709
Rata-Rata					109

Sumber : Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat Dan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 (Dalam satuan %), BPS Kota Padang 2011, Data Diolah.

Data diatas merupakan Persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah menurut kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara pada tahun 2008. Dimana digunakan sebagai indikator dari kondisi demografis pada tiap-tiap kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Daerah yang memiliki migrasi penduduk masuk ke suatu daerah yang tertinggi adalah daerah Tapanuli Tengah sebesar 40,51 %. Dan terendah dialami oleh daerah Sawah lunto sebesar 3,25 %.

Dalam hal ini data tentang perbedaan kondisi kelancaran mobilitas barang dan jasa dengan menggunakan persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah sebagai indikator yang akan dianalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara pada tahun 2008.

4.2.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan dari pemerintah merupakan hal yang tidak dapat disangkal lagi bahwasanya hal tersebut mampu mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional secara langsung. Menurut (Sjafrizal, 2008: 120), menyatakan bahwa dana perimbangan sebagai dana yang dialokasikan pemerintah dalam pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan suatu investasi yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Daerah yang memiliki dana perimbangan yang lebih besar akan mendorong proses pembangunan daerahnya melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang menjadi lebih tinggi.

Maka dari itu penulis menyertakan variabel dari data tentang dana perimbangan menurut kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara tahun 2008 sebagai berikut :

TABEL 4.9

Data Nilai Dana Perimbangan Menurut Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera

Barat Dan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008

(Dalam Satuan Rupiah)

NO	DAERAH	Dana Perimbangan
1	Kep mentawai	89.995.769
2	Pesisir selatan	145.160.880
3	Solok selatan	155.057.891
4	Sawah lunto/Sijunjung	265.523.064
5	Tanah datar	260.087.727
6	Padang pariaman	264.735.789
7	Agam	149.911.011
8	Limo puluh koto	262.506.152
9	Pasaman	196.295.444
10	Padang	142.801.898
11	Solok	196.359.934
12	Sawah lunto	190.445.086
13	Padang panjang	79.318.657
14	Bukit tinggi	122.928.164
15	Payakumbuh	141.245.352
16	Nias	281.549.898
17	Mandailing Natal	271.381.225
18	Tapanuli Selatan	262.708.203
19	Tapanuli Tengah	889.762.876
20	Tapanuli Utara	142.211.913
21	Toba Samosir	117.365.820
22	Labuhan Batu	263.880.154
23	Asahan	14.2742.168
24	Simalungun	258.971.638
25	Dairi	149.604.021
26	Karo	139.298.129
27	Deli Serdang	142.095.711
28	Langkat	155.263.025
29	Sibolga	200.274.670
30	Tanjung Balai	94.777.301
31	Pematang Siantar	138.899.756
32	Tebing Tinggi	133.044373
33	Medan	1.086.048.630

34	Binjai	137.228.496
	Jumlah	7.669.480.825

Sumber: Data Nilai Dana Perimbangan Menurut Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat Dan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 (Dalam Satuan Rupiah), PSs Kota Padang 2011, Data Diolah.

Data diatas merupakan data dana perimbangan menurut kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara tahun 2008. Dari data terlihat bahwa setiap daerah kabupaten/kota memiliki proporsi dana perimbangan dari pemerintah yang berbeda-beda dimana hal ini didasarkan pada kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dana pembangunan tersebut ke setiap daerah.

Dari data-data diatas, produktifitas pertanian tanaman padi baik padi sawah maupun padi lading sebagai indikator dari tingkat kandungan sumber daya alam, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebagai indikator dari kondisi demografis penduduk, data persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah sebagai indikator dari kelancaran mobilitas barang dan jasa, serta data nilai dana perimbangan sebagai indikator dari alokasi dana pembangunan pada setiap kabupaten/kota di propinsi Sumatera barat dan propinsi Sumatera Utara pada tahun 2008, menjadi variabel bebas yang akan penulis hipotesa seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan tingkat ketimpangan ekonomi regional sebagai variabel terikat pada setiap kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara pada tahun 2008.

BAB V

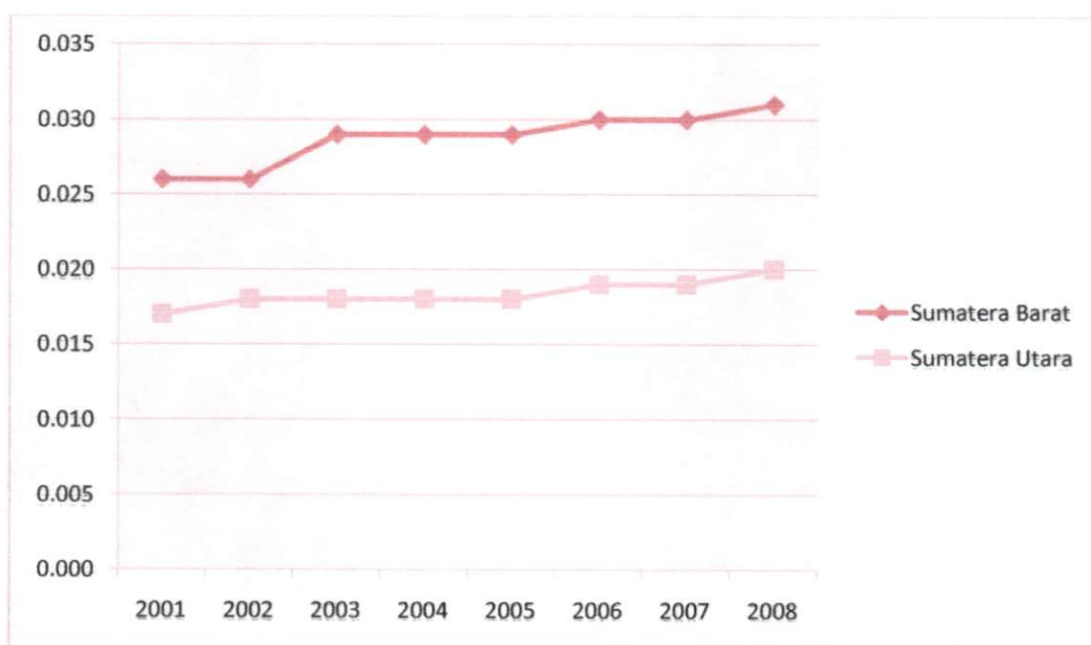
TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Temuan Empiris

Dalam perumusan masalah yang pertama, yaitu tentang menganalisis seberapa besar tingkat ketimpangan ekonomi regional yang terjadi antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan theil indeks (T_d). Dari hasil perhitungan tingkat ketimpangan ekonomi regional dengan menggunakan theil indeks tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Grafik 5.1

Perkembangan Tingkat Ketimpangan Ekonomi Regional Antar Kabupaten/Kota di
Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2008



Data diatas diambil dari nilai rata-rata tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara, hal ini memperlihatkan bahwa :

1. Tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota yang terjadi di paling tinggi terjadi pada propinsi Sumatera Barat lebih besar dibandingkan dengan tingkat etimpangan ekonomi regional yang terjadi pada kabupaten/kota di propinsi Sumatera Utara.
2. Kedua propinsi sama-sama memiliki tingkat ketimpangan ekonomi regional yang meningkat sepanjang tahun. Jika digunakan asumsi teori atau model neo-klasik pada bab II grafik 2.1, dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi regional yang terjadi di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara masih pada tahap awal, berarti pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih mengakibatkan meningkatnya tingkat ketimpangan ekonomi regional tersebut.

Dalam perumusan masalah tentang menganalisis pengaruh faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi regional terhadap tingkat ketimpangan perekonomian di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Dengan menggunakan satu variabel dependent dan empat variabel independent, variabel dependent merupakan variabel yang diterangkan oleh variabel independent dan biasanya terletak disisi kiri. Sedangkan variabel independent adalah variabel yang menerangkan variabel dependent dan biasanya terletak disisi kanan. Dalam penelitian ini variabel dependent yang digunakan adalah jumlah tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara yang diterangkan oleh variabel independent berupa tingkat produktifitas tanaman padi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah, serta dana perimbangan pada setiap kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.

Data yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan

propinsi Sumatera Utara, yaitu data tingkat produktifitas tanaman padi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah, serta dana perimbangan pada kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara pada tahun 2008.

Pengolahan data dilakukan dengan metode analisa OLS (Ordinary Lest Square) yang terlebih dahulu dirobah dalam bentuk logaritma, kecuali untuk tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara karena variabel ini merupakan variabel dalam bentuk pecahan. Pengolahan data menggunakan program SPSS Version 16.0. Pengolahan data dilakukan dengan meregresi variabel dependent dengan variabel independent. Analisa regresi berguna untuk mangkaji pengaruh tingkat produktifitas tanaman padi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah, serta dana perimbangan pada setiap kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Model regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda, karena pada penelitian ini terdapat tiga variabel independent, yaitu sebagai berikut:

$$K = \beta_0 + \beta_1 \text{Log PTP} + \beta_2 \text{Log TPAK} + \beta_3 \text{PMM} + \beta_4 \text{Log DP} + \varepsilon \dots\dots\dots (5.1)$$

Dimana :

- K : Ketimpangan Ekonomi Regional (0 - 1)
- PTP : Produktifitas Tanaman Padi (Ton)
- TPAK : Tingkat Partisipasi angkatan kerja (persen)
- PMM : Persentase Migrasi Penduduk Masuk, (persen)
- DP : Dana Perimbangan (Rupiah)

β_0	: Konstanta
β_{1-4}	: Koefisien dari variabel
ε	: Error term

Dari hasil pengolahan data pada masing-masing variabel berdasarkan pada persamaan matematis diatas, maka diperoleh hasil regresi sebagai berikut :

$$K = 0.325 - 0.006 \text{ PTP} - 0.155 \text{ TPAK} - 0.011 \text{ PMM} - 0.032 \text{ DP} \dots\dots\dots (5.2)$$

t-statistik : (6,550) (-2,609) (-5,379) (-3,414) (-2,122)

R^2 = 0,954

R^2 Adjusted = 0,899

F-statistik = 85,409

Durbin-Watson = 1,648

5.1.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat dan menganalisa seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) juga digunakan untuk menguji apakah variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent.

Dari hasil perhitungan regresi diperoleh nilai R^2 Adjusted sebesar 0,899. Hal ini memberikan pengertian bahwa perubahan variabel independent mampu menjelaskan perubahan variabel dependent sebesar 89,9%. Dengan kata lain, sebesar 89,9% perubahan tingkat produktifitas tanaman padi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), persentase migrasi penduduk masuk, dan dana perimbangan pada setiap kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara

sebagai variabel independen mampu menjelaskan besarnya perubahan tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Sedangkan sisanya sebesar 10,1% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain diluar model yang digunakan. Penulis menggunakan R^2 Adjusted sebagai koefisien determinasi karena penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independent (bebas).

Standard Error of the Estimate (SEE) pada penelitian ini adalah sebesar 0,00549039. Nilai ini berfungsi untuk menguji apakah model regresi sudah berfungsi dengan baik sebagai prediktor atau belum. Untuk itu, nilai SEE harus dibandingkan dengan nilai simpangan baku variabel dependent, yaitu sebesar 0,01642285. Nilai SEE ternyata lebih kecil dari pada nilai simpangan baku, maka model regresi yang digunakan dapat dijadikan sebagai prediktor tingkat ketimpangan ekonomi regional. Nilai SEE juga menunjukkan tingkat kesalahan model yang digunakan untuk menjelaskan variabel dependent. Dengan demikian, tingkat kesalahan model yang digunakan dalam menjelaskan faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional hanya sebesar 0,00564124. Semakin kecil nilai SEE, maka akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependent, yaitu jumlah tingkat ketimpangan ekonomi regional.

5.1.2 Pengujian F-test

F-test digunakan untuk menentukan apakah secara bersama-sama variabel independent mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. Apabila F-hitung lebih besar dari pada F-tabel maka seluruh variabel independent yang diuji berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent. Sebaliknya, apabila F-

hitung lebih kecil daripada F-tabel, maka seluruh variabel independent tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent.

Dari hasil pengujian regresi diperoleh nilai F-test adalah sebesar 85,409 dengan tingkat signifikan 0,000. Sedangkan F-tabel dihitung dengan cara $df1 = k-1$, dan $df2 = n-k$, dimana k adalah jumlah variabel (baik variabel dependent maupun variabel independent), sedangkan n adalah jumlah data, sehingga diperoleh nilai F-tabel (pada tabel F), berkisar antara 2,69 hingga 2,70. Dengan demikian, nilai F-test lebih besar dari F-tabel ($F\text{-test} > F\text{-tabel}$), artinya variabel independent secara bersama-sama (keseluruhan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. Dengan kata lain, tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat dan provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh tingkat produktifitas tanaman padi, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase migrasi penduduk masuk dan dana perimbangan pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat dan provinsi Sumatera Utara. Berarti model regresi bisa dipakai untuk memprediksi tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat dan provinsi Sumatera Utara.

5.1.3 Uji t-test

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi setiap variabel independent terhadap variabel dependent. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah taraf 5%. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. Apabila nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel atau t-hitung lebih kecil dari min t-tabel atau ($\min t\text{-tabel} > t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$), maka variabel independent tersebut signifikan terhadap variabel dependent. Sebaliknya, apabila nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel atau t-hitung lebih besar dari min t-tabel atau ($\min t\text{-tabel} < t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$), maka variabel independent tersebut tidak signifikan terhadap variabel dependent.

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai t-test produksi tanaman padi sebesar -2,609, nilai t-test tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar -5,379 dan nilai t-test persentase migrasi penduduk masuk sebesar -3,414 dan nilai t-test dana perimbangan sebesar -2,122. Sedangkan t-tabel dihitung dengan cara $df1 = \alpha/2$, sedangkan $df2 = n - k$, dimana dari perhitungan tersebut diperoleh nilai t-tabel (pada tabel t), sebagai wilayah kritis pada pengujian yang dilakukan adalah sepanjang, $-1,960 < t\text{-tabel} < 1,960$.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa:

a. Produksi Tanaman Padi

Produksi tanaman padi secara statistik berhubungan negatif dan signifikan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung produksi tanaman padi lebih kecil dari nilai min t-tabel, yaitu -2,609 lebih kecil dari -1,960. Ini berarti besarnya produksi tanaman padi mempengaruhi besarnya tingkat ketimpangan ekonomi regional antara kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.

Penyebab produksi tanaman padi signifikan terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional antara kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara adalah karena variasi perubahan produksi tanaman padi bisa dikatakan hampir sejalan dengan variasi perubahan tingkat ketimpangan ekonomi regional. Dengan kata lain, peningkatan produksi tanaman padi diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan ekonomi regional. Begitu sebaliknya, disaat produksi tanaman padi mengalami penurunan, diikuti oleh peningkatan tingkat ketimpangan ekonomi regional. Besarnya perubahan antara produksi tanaman padi dengan tingkat ketimpangan ekonomi regional hampir sebanding. Pada saat

produksi tanaman padi mengalami peningkatan, tingkat ketimpangan ekonomi regional mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dimana pada daerah yang tingkat ketimpangan ekonomi regionalnya kecil seperti Tapanuli Tengah sebesar 0.0001 memiliki produktifitas tanaman padi sebesar 721667 Ton. Pada daerah yang tingkat ketimpangannya sedang seperti Tanah datar, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Padang Pariaman, Limo puluh koto, Sawah lunto/Sijunjung, dan Mandailing Natal memiliki produktifitas tanaman padi antara 715061 sampai 651858 Ton. Pada daerah yang ketimpangan ekonomi regionalnya cukup besar seperti Pasaman, Langkat, Solok selatan, Asahan, Agam, Dairi, Tapanuli Utara, Pesisir selatan, Karo, dan Medan memiliki tingkat produktifitas tanaman padi antara 166407 sampai 85999 Ton. Pada daerah yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi regional yang tinggi seperti Deli Serdang, Payakumbuh, Binjai, Pematang Siantar, Padang, Tebing Tinggi, Bukit tinggi, Toba Samosir, Tanjung Balai, Kep.Mentawai, dan Padang panjang memiliki produktifitas tanaman padi sebesar 35033 sampai 21064 Ton. Sedangkan pada daerah yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi regional yang sangat besar seperti Sibolga, Solok dan Sawah lunto tidak mutlak di pengaruhi oleh produktifitas tanaman padi, namun ada faktor lain yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan ekonomi regional yang sangat besar. Untuk daerah Sibolga, tidak memiliki sedikitpun produktifitas tanaman padi dikarenakan lokasinya berada di area pantai yang tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman padi. Untuk daerah Solok dan Sawah lunto, memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang sangat besar tidak mutlak dikarenakan oleh kurangnya produktifitas tanaman padinya, karena tingkat produksi tanaman padi pada daerah tersebut juga cukup tinggi. Jadi walaupun demikian setelah dilakukan pengujian regresi linier berganda, bisa dikatakan

tingkat produksi tanaman padi sebagai indikator dari tingkat kandungan sumber daya alam pada suatu daerah, mampu mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.

b. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja secara statistik berhubungan negatif dan signifikan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional antara kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung tingkat partisipasi angkatan kerja lebih besar dari pada nilai t-tabel, yaitu -5,379 lebih kecil dari -1,960. Ini berarti jumlah Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional secara negatif. Peningkatan Tingkat partisipasi angkatan kerja mampu menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi regional. Dapat dilihat pada beberapa daerah yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi seperti Tapanuli Tengah, Nias, Mandailing Natal, Sawah lunto/Sijunjung, Limo puluh koto, Padang Pariaman, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, Tanah datar, Simalungun, Pasaman, Langkat, Solok selatan, Asahan, Agam Dairi Tapanuli Utara, Pesisir selatan, Karo, dan Medan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja antara 90,93% sampai 60,11% memiliki tingkat ketimpangan ekonomi regional yang lebih kecil dari pada daerah yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang kecil seperti Deli Serdang, Payakumbuh, Binjai, Pematang Siantar, Padang, Tebing Tinggi, Bukit tinggi, Toba Samosir, Tanjung Balai, Kep mentawai, Padang panjang, Sibolga, Solok, dan Sawah lunto yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja

sebesar 56,28% sampai 49,26%. Pada beberapa data tersebut memperlihatkan hubungan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional. Namun pada beberapa daerah seperti sibolga dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi yakni sebesar 63.33 %, namun menghasilkan ketimpangan ekonomi regional yang tinggi yaitu sebesar 0.047. sedangkan pada daerah pasaman, dengan tingkat partisi angkatan kerja yang rendah yakni sebesar 61.01 %, namun menghasilkan tingkat ketimpangan ekonomi regional yang lebih kecil dari pada kota Sibolga yaitu sebesar 0.011.

Namun bisa dikatakan pada sebagian sampel, tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai indikator dari kondisi demografi penduduk juga berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara, namun berpengaruh tidak secara signifikan.

c. Persentase Migrasi Penduduk masuk ke suatu daerah.

Tingkat persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah secara statistik berhubungan negatif dan signifikan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional antara kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung Tingkat persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah lebih kecil dari pada nilai t-tabel, yaitu nilai -2,122 lebih kecil dari -1,960. Secara hipotesa, Tingkat penduduk masuk ke suatu daerah berhubungan negatif dengan tingkat ketimpangan ekonomi regional antara kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara, karena secara hipotesa jika migrasi penduduk masuk kesuatu daerah berjalan dengan baik maka tingkat input

faktor produksi pada daerah tersebut akan meningkat, maka kelancaran mobilitas barang dan jasa akan semakin baik dan akan mengakibatkan penurunan tingkat ketimpangan ekonomi regional pada daerah tersebut.

Pada hipotesis yang penulis temukan, menunjukkan hubungan yang signifikan antara migrasi penduduk masuk ke suatu daerah terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Seperti pada kota yang memiliki persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah lebih besar akan tetapi memiliki tingkat ketimpangan ekonomi regional yang lebih kecil.

d. Dana Perimbangan

Dana perimbangan secara statistik berhubungan negatif dan signifikan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung dana perimbangan lebih kecil dari nilai min t-tabel, yaitu -2,122 lebih kecil dari -1,960. Ini berarti besarnya dana perimbangan mempengaruhi besarnya tingkat ketimpangan ekonomi regional antara kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.

Penyebab dana perimbangan signifikan terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional antara kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara adalah karena variasi perubahan dana perimbangan setelah dilakukan analisis regresi linier berganda, dapat dikatakan hampir sejalan dengan variasi perubahan tingkat ketimpangan ekonomi regional. Dengan kata lain, peningkatan dana perimbangan diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan ekonomi regional. Begitu sebaliknya, disaat dana

perimbangan mengalami penurunan, diikuti oleh peningkatan tingkat ketimpangan ekonomi regional. Besarnya perubahan antara dana keseimbangan dengan tingkat ketimpangan ekonomi regional hampir sebanding. Pada saat dana keseimbangan mengalami peningkatan, tingkat ketimpangan ekonomi regional pada sebagian mengalami penurunan yang cukup signifikan terhadap penurunan pada variabel dana keseimbangan tersebut.

Dimana pada daerah yang tingkat ketimpangan ekonominya kecil seperti Tapanuli Tengah sebesar 0.0001 memiliki dana keseimbangan sebesar Rp.589.762.876,00. Pada daerah yang tingkat ketimpangannya sedang seperti Tanah datar, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Padang Pariaman, Limopuluh koto, Sawah lunto/Sijunjung/Damasraya, dan Mandailing Natal memiliki dana keseimbangan antara Rp.286.048.630,00 sampai Rp.258.971.638,00. Pada daerah yang ketimpangan ekonominya cukup besar seperti Pasaman, Langkat, Solok selatan, Asahan, Agam, Dairi, Tapanuli Utara, Pesisir selatan, Karo, dan Medan memiliki dana keseimbangan antara Rp.196.295.444,00 sampai Rp.286.048.630,00. Pada daerah yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi regional yang tinggi seperti Deli Serdang, Payakumbuh, Binjai, Pematang Siantar, Padang, Tebing Tinggi, Bukit tinggi, Toba Samosir, Tanjung Balai, Kep mentawai, dan Padang panjang memiliki dana keseimbangan sebesar Rp.142.095.711,00 sampai Rp.79.318.657,00. Sedangkan pada daerah yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi regional yang sangat besar seperti Solok dan Sawah lunto memiliki dana keseimbangan sebesar Rp. 66.359.934,00 sampai Rp.60.445.086.00. Namun untuk daerah Sibolga, tidak berlaku hal tersebut, karena dana keseimbangan yang dimilikinya pada tahun 2008 adalah sebesar

Rp.200.274.670,00, namun juga memiliki tingkat ketimpangan ekonomi regional yang besar.

5.1.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent (variabel bebas). Pada model regresi yang baik tidak terdapat korelasi antar variabel independent. Multikolinearitas, salah satunya dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation faktor (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance-nya lebih kecil dari 0.01 ($\text{tolerance} < 0,10$), dan pada nilai VIF-nya lebih besar dari 10 ($\text{VIF} > 10$). Hasil pengujian model regresi yang diperoleh menunjukkan nilai-nilai tolerance dan VIF untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant).		
Produksi Tanaman Padi.	.645	1.550
Tingkat Partisipasi. Angkatan Kerja (TPAK).	.217	4.598
Dana Parimbangan.	.218	4.593

Sumber: data penelitian yang diolah, 2011

Tabel 5.1 menunjukkan nilai tolerance untuk semua variabel independen di atas 0,10 dan nilai VIF untuk semua variabel independen juga dibawah 10. Hal ini

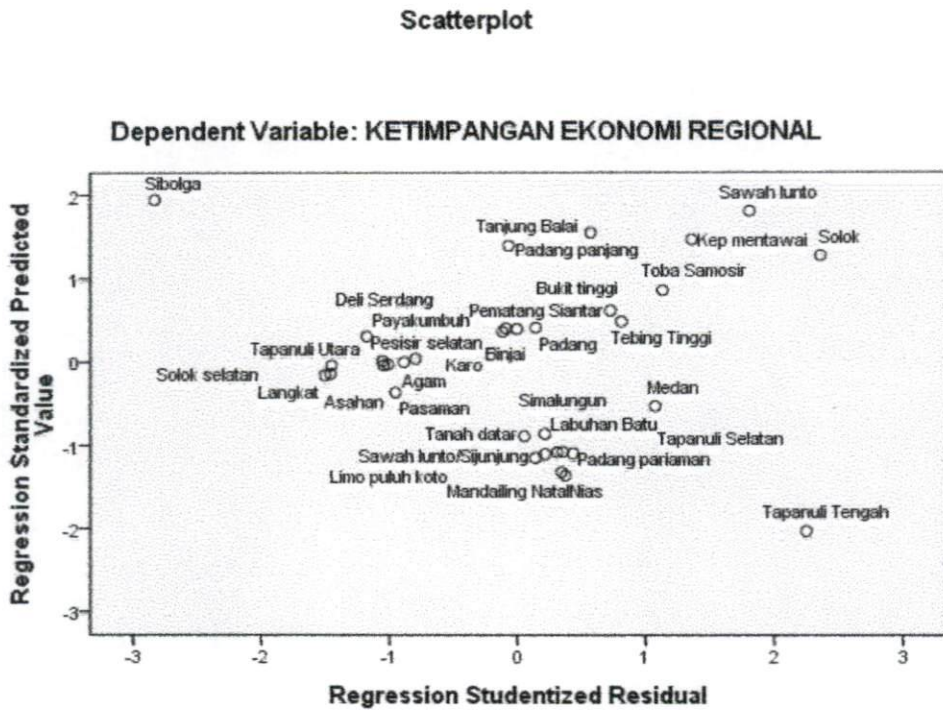
sesuai dengan syarat tidak terjadinya multikolinearitas, sehingga semua variabel independen tersebut layak digunakan untuk variabel prediktor.

5.1.5 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memastikan dalam model regresi terjadi kesamaan variance (homoskedastisitas) dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji ini dilakukan karena data yang digunakan untuk observasi penelitian merupakan data crosssectional, yaitu data yang digunakan memakai data pada satu tahun dengan beberapa kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara menjadi jumlah data (n). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan residualnya.

Gambar 5.1

Uji Heteroskedastisitas – Scatterplot



Sumber: data penelitian yang diolah, 2011

Berdasarkan Gambar 5.1 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen.

5.1.6 Koefisien Regresi

Pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent dapat diketahui melalui koefisien regresi masing-masing variabel independent tersebut. Sedangkan nilai konstanta sebesar 0.325 menjelaskan bahwa jika tidak ada produktifitas tanaman padi, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah serta dana perimbangan, maka tingkat ketimpangan ekonomi regional adalah sebesar 0,325. Produktifitas tanaman padi mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional dengan koefisien regresi sebesar -0,006. Artinya dengan mempertahankan semua variabel independent dalam keadaan konstan, maka produktifitas tanaman padi akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan ekonomi regional. Sedangkan arti dari koefisien regresi -0,006 adalah jika produksi tanaman padi meningkat sebesar 1 Ton (dalam satu satuan Logaritma-nya), maka jumlah ketimpangan ekonomi regional akan menurun sebesar -0,006. Hasil pengujian ini sesuai dengan hipotesa, semakin besar produksi tanaman padi maka semakin rendah ketimpangan ekonomi regional.

Tingkat partisipasi angkatan kerja mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi regional dengan koefisien regresi sebesar -0,155. Artinya dengan mempertahankan semua variabel independent dalam keadaan konstan, maka Tingkat partisipasi angkatan kerja akan berpengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional. Sedangkan arti dari koefisien regresi -0,155 adalah jika Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat sebesar 1% (dalam satu satuan Logaritma-nya), maka tingkat ketimpangan ekonomi regional akan menurun sebesar -0,155 Hasil pengujian ini juga sesuai dengan hipotesa penelitian, yaitu semakin tinggi Tingkat partisipasi angkatan kerja, maka semakin rendah tingkat ketimpangan ekonomi regional dan berpengaruh secara signifikan.

Persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah sebagai indikator dari kelancaran mobilitas barang dan jasa, setelah dilakukan penelitian terhadap variabel tersebut. Dihasilkan hubungan yang negative dengan koefisien regresi sebesar -0.011 . Artinya dengan mempertahankan semua variabel independent dalam keadaan konstan, maka persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan ekonomi regional. Sedangkan arti dari koefisien regresi $-0,011$ adalah jika persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah sebesar 1 % (dalam satu satuan Logaritma-nya), maka jumlah ketimpangan ekonomi regional akan menurun sebesar $-0,011$. Hasil pengujian ini sesuai dengan hipotesa, semakin besar persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah maka semakin rendah ketimpangan ekonomi regional.

Untuk variabel dana perimbangan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara dengan nilai koefisien sebesar $-0,032$, menunjukan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional. Artinya dengan mempertahankan semua variabel independent dalam keadaan konstan, maka dana perimbangan akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan ekonomi regional. Sedangkan arti dari koefisien regresi $-0,032$ adalah jika dana perimbangan meningkat sebesar 1 satuan rupiah (dalam satu satuan Logaritma-nya), maka jumlah ketimpangan ekonomi regional akan menurun sebesar $-0,032$. Hasil pengujian ini sesuai dengan hipotesa, semakin tinggi dana perimbangan maka semakin rendah ketimpangan ekonomi regional.

5.2 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan pada hasil regresi yang dilakukan terhadap data produksi tanaman padi, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah serta dana perimbangan antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara pada tahun 2008 dilihat pengaruhnya terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2008.

Dari hasil regresi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa diantara empat variabel bebas tersebut terdapat tidak terdapat variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Semua variabel dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional, yaitu data tentang variabel produksi tanaman padi, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase migrasi penduduk masuk ke suatu daerah dan dana perimbangan. Maka dalam hal ini penulis akan lebih memfokuskan implikasi kebijakan pada variabel yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional secara signifikan tersebut.

Produksi tanaman padi setelah diregresi merupakan variabel yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional. Dimana produksi tanaman padi sebagai indikator dari kandungan sumber daya alam, bisa dikatakan dapat memperbaiki tingkat ketimpangan ekonomi regional suatu daerah. Jika suatu daerah memiliki tingkat kandungan sumber daya alam yang besar maka tingkat ketimpangan daerah tersebut dapat teratasi, begitu juga sebaliknya jika suatu daerah tidak memiliki kandungan sumber daya alam yang cukup maka tingkat ketimpangan ekonominya tidak bisa teratasi dengan baik. Namun tingkat kandungan sumber daya alam pada tiap-tiap daerah tidak sama, ada daerah yang memiliki banyak kandungan sumber daya alam dan ada juga yang

tidak memiliki kandungan sumber daya alam. Maka dari itu implikasi kebijakan yang dirasa mampu untuk mengatasi tingkat ketimpangan ekonomi regional dari kandungan sumber daya alam adalah, setiap daerah harus mampu mengusahakan kandungan sumber daya alam yang dimiliki tiap-tiap daerahnya se-efektif dan se-efisien mungkin, sehingga apapun kandungan sumber daya alam yang dimiliki daerah-daerah tersebut akan mampu mengatasi tingkat ketimpangan ekonomi regional.

Tingkat partisipasi angkatan kerja setelah diregresi merupakan variabel yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional. Dimana tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai indikator dari kondisi demografis penduduk, bisa dikatakan dapat memperbaiki tingkat ketimpangan ekonomi regional suatu daerah. Jika suatu daerah memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang besar maka tingkat ketimpangan daerah tersebut dapat teratasi, begitu juga sebaliknya jika suatu daerah tidak memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup maka tingkat ketimpangan ekonomi regionalnya tidak bisa teratasi dengan baik. Namun tingkat partisipasi angkatan kerja pada tiap-tiap daerah tidak sama, ada daerah yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi dan ada juga yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang sangat rendah. Maka dari itu . Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan dengan menggunakan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut adalah, pemerintah harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja seperti meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan, melakukan kebijakan keluarga berencana (KB), memberikan kebijakan Subsidi atau kredit permodalan pada usaha kecil menengah (UKM), atau pun subsidi pada produsen yang banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini dilakukan agar tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dan akan mampu mengatasi masalah ketimpangan ekonomi regional dari segi kondisi demografis penduduk.

Tingkat migrasi penduduk masuk ke suatu daerah secara statistik berhubungan negatif dan signifikan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional antara kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung dana perimbangan lebih kecil dari pada nilai min t-tabel, yaitu -3.414 lebih kecil dari -1,960. Ini berarti besarnya tingkat migrasi penduduk masuk ke suatu daerah mempengaruhi besarnya tingkat ketimpangan ekonomi regional antara kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.

Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan dengan menggunakan variabel persentase tingkat migrasi penduduk masuk ke suatu daerah tersebut adalah, pemerintah harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kelancaran mobilitas barang dan jasa tersebut terutama pada sektor migrasi penduduk. Seperti dengan penyediaan sarana dan prasarana yang menarik investor swasta untuk masuk pada daerah tersebut baik secara tenaga kerja maupun secara modal saja yang masuk pada daerah tersebut. Sedangkan kepada masyarakat pada daerah itu sendiri, harus mampu mengoptimalkan faktor-faktor produksinya, agar tidak mudah dijatuhkan oleh penduduk migrasi yang masuk pada daerah tersebut, sehingga mampu menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi regional pada daerah tersebut melalui pendapatan masyarakat yang meningkat.

Variabel terakhir adalah dana perimbangan sebagai indikator dari dana pembangunan daerah, dari data yang dianalisis dari pengaruh dana perimbangan terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara pada tahun 2008, menunjukkan hubungan yang negative dan signifikan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional. Maka implikasi kebijakan yang dapat dilakukan dengan menggunakan variabel dana perimbangan adalah dengan meningkatkan dana perimbangan pada daerah yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi regional yang tinggi. Hal ini bertujuan agar tingkat ketimpangan ekonomi

regional tersebut tidak semakin membesar, sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Namun permasalahannya adalah sistem pengalokasian dana perimbangan pada saat sekarang ini adalah dengan sistem desentralisasi yaitu daerah yang memiliki potensi yang tinggi, baik potensi sumber daya alam maupun industri, akan mendapatkan dana perimbangan yang besar. Bergitu juga sebaliknya, daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam dan sektor industri yang kecil, akan mendapatkan dana perimbangan yang kecil pula. Dalam hal ini harus diperhatikan kembali, karena dana perimbangan tersebut sangat besar berpengaruhnya dalam menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi regional.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara, maka diperoleh hasil bahwa produksi tanaman padi sebagai indikator kandungan sumber daya alam, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebagai indikator kondisi demografis penduduk, persentase tingkat migrasi penduduk masuk ke suatu daerah sebagai indikator dari kelancaran mobilitas barang dan jasa dari sektor migrasi penduduk, serta dana perimbangan sebagai indikator dana pembangunan daerah, menentukan seberapa besar tingkat ketimpangan ekonomi regional.

Dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Dari hasil perhitungan regresi diperoleh nilai R^2 Adjusted sebesar 0,884. Hal ini memberikan pengertian bahwa perubahan variabel independent mampu menjelaskan perubahan variabel dependent sebesar 88,4%. Dengan kata lain, sebesar 88,4% perubahan tingkat produktifitas tanaman padi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat migrasi penduduk masuk ke suatu daerah, serta dana perimbangan pada kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara sebagai variabel independen mampu menjelaskan besarnya perubahan tingkat ketimpangan ekonomi regional antar

kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Sedangkan sisanya sebesar 11,6% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain diluar model yang digunakan. Penulis menggunakan R^2 Adjusted sebagai koefisien determinasi karena penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independent (bebas).

2. Dari hasil pengujian regresi diperoleh nilai F-test adalah sebesar 85,060 dengan tingkat signifikan 0,000. Sedangkan F-tabel dihitung dengan cara $df1 = k-1$, dan $df2 = n-k$, dimana k adalah jumlah variabel (baik variabel dependent maupun variabel dependent), sedangkan n adalah jumlah data, sehingga diperoleh nilai F-tabel (pada tabel F) berkisar antara 2,92 hingga 2,93. Dengan demikian, nilai F-test lebih besar dari F-tabel ($F\text{-test} > F\text{-tabel}$), artinya variabel independent secara bersama-sama (keseluruhan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. Dengan kata lain, tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh tingkat produktifitas tanaman padi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat migrasi penduduk masuk ke suatu daerah, serta dana perimbangan pada kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Berarti model regresi bisa dipakai untuk memprediksi tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.
3. Produksi tanaman padi secara statistik berhubungan negatif dan signifikan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional antara kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Hal

ini ditunjukkan oleh nilai min t-hitung produksi tanaman padi lebih kecil dari nilai t-tabel, yaitu -7,276 lebih kecil dari -1,960. Ini berarti besarnya produksi tanaman padi mempengaruhi besarnya tingkat ketimpangan ekonomi regional antara kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.

4. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara statistik berhubungan negatif dan signifikan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional antara kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) lebih kecil dari pada nilai min t-tabel, yaitu -5,379 lebih kecil dari -1,960. Ini berarti jumlah Tingkat partisipasi angkatan kerja mampu mempengaruhi besarnya tingkat ketimpangan ekonomi regional. Peningkatan Tingkat partisipasi angkatan kerja mampu menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi regional
5. Tingkat migrasi penduduk masuk ke suatu daerah secara statistik berhubungan negatif dan signifikan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional antara kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung dana perimbangan lebih kecil dari pada nilai min t-tabel, yaitu -3,414 lebih kecil dari -1,960. Ini berarti besarnya tingkat migrasi penduduk masuk ke suatu daerah mempengaruhi besarnya tingkat ketimpangan ekonomi regional antara kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.
6. Dana perimbangan secara statistik berhubungan negatif dan signifikan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional antara kabupaten/kota

di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung dana perimbangan lebih kecil dari pada nilai min t-tabel, yaitu -2.799 lebih kecil dari -1,960. Ini berarti besarnya dana perimbangan mempengaruhi besarnya tingkat ketimpangan ekonomi regional antara kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Tolak Hipotesa nol (H_0) Pada Variabel Produksi Tanaman Padi

Produksi tanaman padi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional.

b) Tolak Hipotesa nol (H_0) Pada Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional.

c) Tolak Hipotesa nol (H_0) pada variabel Tingkat Migrasi Penduduk Masuk Ke Suatu Daerah.

Tingkat migrasi penduduk masuk ke suatu daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional.

d) Tolak Hipotesa nol (H_0) Pada Variabel Dana Perimbangan

Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional.

6.2 Saran

1. Produksi tanaman padi setelah diregresi merupakan variabel yang paling signifikan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional. Dimana produksi tanaman padi sebagai indikator dari kandungan sumber daya alam, bisa dikatakan dapat memperbaiki tingkat ketimpangan ekonomi regional suatu daerah. Jika suatu daerah memiliki tingkat kandungan sumber daya alam yang besar maka tingkat ketimpangan ekonomi regional antar daerah tersebut dapat teratasi, begitu juga sebaliknya jika suatu daerah tidak memiliki kandungan sumber daya alam yang cukup maka tingkat ketimpangan ekonomi regionalnya tidak bisa teratasi dengan baik. Namun tingkat kandungan sumber daya alam pada tiap-tiap daerah tidak sama, ada daerah yang memiliki banyak kandungan sumber daya alam dan ada juga yang tidak memiliki kandungan sumber daya alam. Maka dari itu implikasi kebijakan yang dirasa mampu untuk mengatasi tingkat ketimpangan ekonomi regional dari kandungan sumber daya alam adalah, setiap daerah harus mampu mengusahakan pengelolaan atau pengolahan kandungan sumber daya alam yang dimiliki tiap-tiap daerahnya se-efektif dan se-efisien mungkin, sehingga apapun kandungan sumber daya alam yang dimiliki daerah-daerah tersebut akan mampu mengatasi tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera barat dan propinsi Sumatera Utara.

2. Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai indikator dari kondisi demografi penduduk dalam menganalisis pengaruhnya terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara pada tahun 2008, ternyata setelah di analisis variabel persentase tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut berpengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional secara signifikan. Dari data penelitian terlihat bahwa data memperlihatkan pengaruhnya terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi angkatan kerja juga dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional secara signifikan. Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan dengan menggunakan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut adalah, pemerintah harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja seperti meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan, melakukan kebijakan keluarga berencana (KB), memberikan kebijakan Subsidi atau kredit permodalan pada usaha kecil menengah (UKM), atau pun subsidi pada produsen yang banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini dilakukan agar tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dan akan mampu mengatasi masalah ketimpangan ekonomi regional dari segi kondisi demografis penduduk.
3. Tingkat migrasi penduduk masuk ke suatu daerah sebagai indikator dari kelancaran mobilitas barang dan jasa dari sektor migrasi penduduk dalam menganalisis pengaruhnya terhadap tingkat ketimpangan

ekonomi regional antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara pada tahun 2008, ternyata setelah di analisis variabel persentase tingkat migrasi penduduk masuk ke suatu daerah tersebut berpengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional secara signifikan. Dari data penelitian terlihat bahwa data memperlihatkan pengaruhnya terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional. Dapat disimpulkan bahwa persentase tingkat migrasi penduduk masuk ke suatu daerah juga dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional secara signifikan. Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan dengan menggunakan variabel persentase tingkat migrasi penduduk masuk ke suatu daerah tersebut adalah, pemerintah harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kelancaran mobilitas barang dan jasa tersebut terutama pada sektor migrasi penduduk. Seperti dengan penyediaan sarana dan prasarana yang menarik investor swasta untuk masuk pada daerah tersebut baik secara tenaga kerja maupun secara modal saja yang masuk pada daerah tersebut. Sedangkan kepada masyarakat pada daerah itu sendiri, harus mampu mengoptimalkan faktor-faktor produksinya, agar tidak mudah dijatuhkan oleh penduduk migrasi yang masuk pada daerah tersebut, sehingga mampu menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi regional pada daerah tersebut melalui peningkatan pendapatan masyarakat.

4. Variabel terakhir adalah dana perimbangan sebagai indikator dari dana pembangunan daerah, dari data yang dianalisis dari pengaruh dana perimbangan terhadap tingkat ketimpangan ekonomi regional antar kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat dan provinsi Sumatera Utara pada tahun 2008, menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi regional. Maka implikasi kebijakan yang dapat dilakukan dengan menggunakan variabel dana perimbangan adalah dengan meningkatkan dana perimbangan pada daerah yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi regional yang tinggi. Hal ini bertujuan agar tingkat ketimpangan tersebut tidak semakin membesar, sehingga distribusi pendapatan menjadi merata. Namun permasalahannya adalah sistem pengalokasian dana perimbangan pada saat sekarang ini adalah dengan sistem desentralisasi yaitu daerah yang memiliki potensi yang tinggi, baik potensi sumber daya alam maupun industri, akan mendapatkan dana perimbangan yang besar. Begitu juga sebaliknya, daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam dan sektor industri yang kecil, akan mendapatkan dana perimbangan yang kecil juga. Dalam hal ini harus diperhatikan kembali, karena dana perimbangan tersebut sangat besar berpengaruhnya dalam menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Ke- 3*. Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin. 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Cetakan Pertama*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Budiono. 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE.
- Budiono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE.
- Budiono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Budiman, Arif. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Cetakan Keempat*. Penerbit Gramedia. Jakarta.
- Esmara, Hendra. 1986. *Perencanaan dan pembangunan ekonomi di Indonesia*. Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Jeffri, G.M. 2009. Analisis Struktur Perekonomian Berdasarkan Pendekatan Shift Share Di Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 1980 – 2009. Universitas Andalas. Padang.
- Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Edisi 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan, edisi Pertama*. Unit Penerbit Dan Percetakan AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan Erlangga. Yogyakarta.
- Mankiw, N. Geogori. 2000. *Teori Makro Ekonomi, Edisi Keempat*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Nanang, Martono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisa data Sekunder*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Pawanto, Dagang. T. 2006. *Analisa Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa*. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

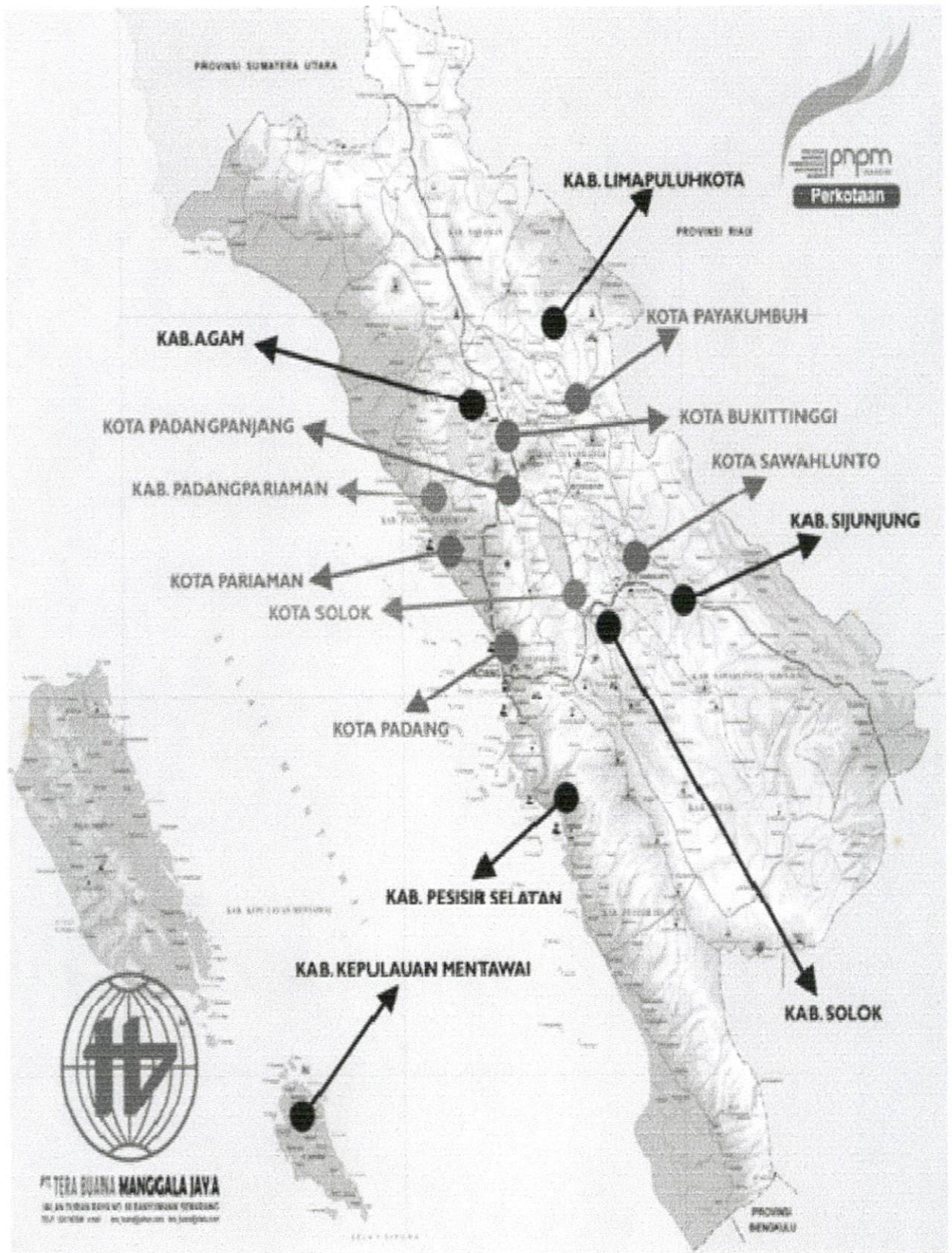
- Priyatno, Dadang. T. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Cetakan Ke-dua. Penerbit: Mediakom. Yogyakarta.
- Riadi. 2010. *Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Riau*. Peneliti Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pendidikan Ekonomi-FKIP Unri. Riau.
- Said, Muhammad. 2005. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat*, Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Setyoso Nugroho, Samuel. 2009. *Analisis Klasifikasi Pola Struktur Ekonomi dan Ketimpangan di Sumatera*, Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Sofyardi, 2005. *Pengantar Ekonometrik modul*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Baduose Media. Padang.
- Socialist Central Committee, Ltd. The Socialist Agenda is presented by the Socialist Central Committee Indianapolis. Editor: Timothy C. Platt; MSM, RFS. The Socialist Agenda Presented by the Socialist Central Committee.
- Sukirno, Sadono. 1989. *Ekonomi Pembangunan*. LPFE UI. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. LPFE UI. Jakarta.
- Tambunan, Tulus. 2006. *Keadilan Dalam Ekonomi, Kadin Indonesia*. JETRO. Jakarta.
- Todaro, Michael. P. 1995. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid 1 Edisi Keempat*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Todaro, Michael. 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid 1 Edisi Ketujuh*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Walpole, Ronald E. 1995. *Pengantar Statistika, Edisi Ke-tiga*. Penerbit Gramedia. Jakarta.
- Wie, Thee Kian. 1983. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan : Beberapa Pendekatan Alternatif*. LP3S. Jakarta.

BPS Kota Padang 2011

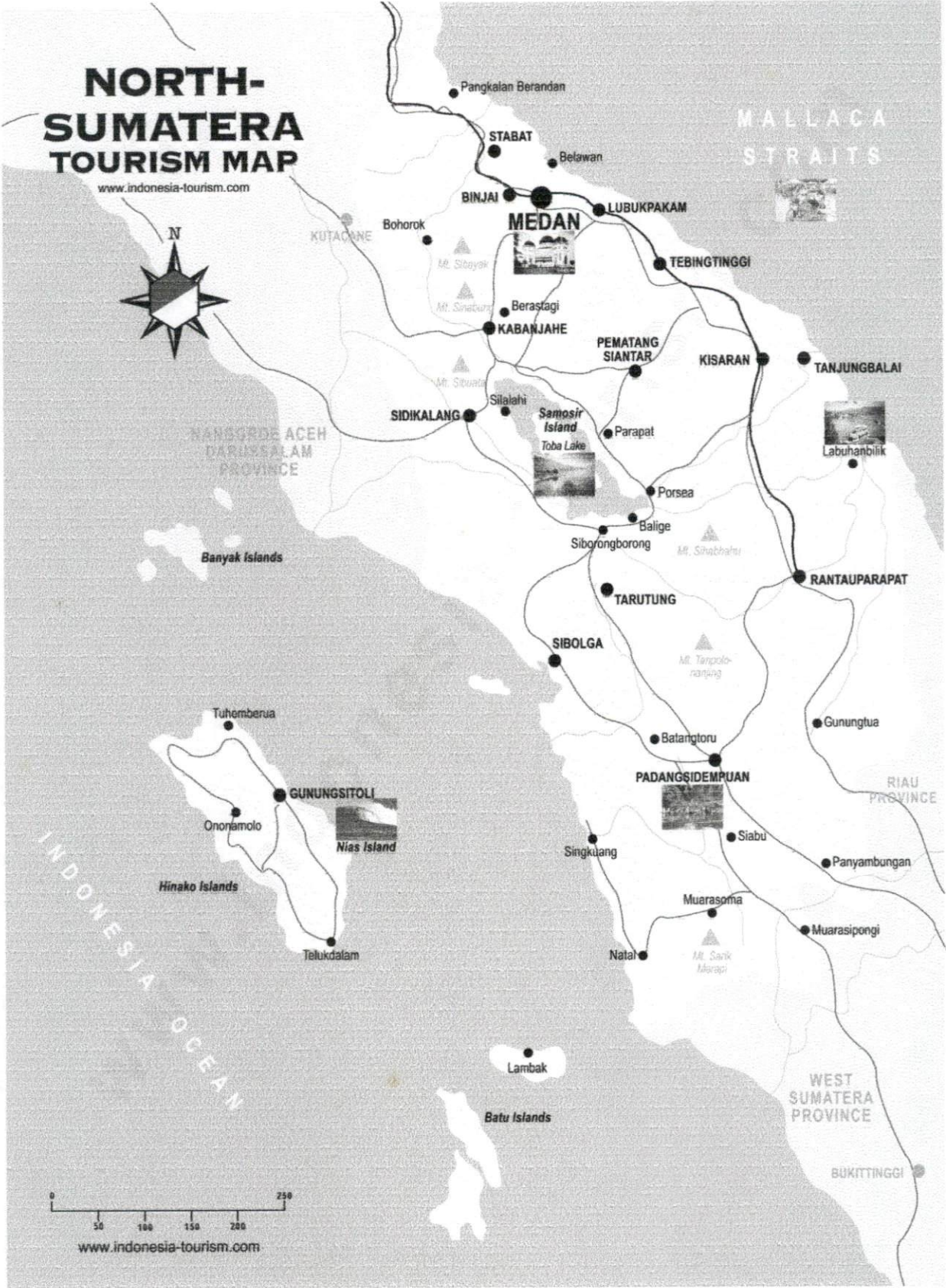
www.google.com

Lampiran I

Gambar Peta Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat



Gambar Peta Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara



LAMPIRAN II

Uji Statistik : Uji Determinasi, Uji t-test, Uji F-test dan Uji Multikolinearitas

Regression

[DataSet1]

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KETIMPANGAN EKONOMI REGIONAL	.0209454	.01642285	34
PRODUKTIFITAS TANAMAN PADI	4.7328690 E0	1.19747246	34
TPAK	1.7841514 E0	.07172400	34
DANA PERIMBANGAN	8.2696315 E0	.23630546	34
PERSentase MIGRASI MASUK	1.4018811 E0	.45505919	34

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.954 ^a	.899	.892	.00549039	.899	85.409	4	29	.000	1.648

- a. Predictors: (Constant), PERSENTASE MIGRASI MASUK, DANA PERIMBANGAN, PRODUKTIFITAS TANAMAN PADI, TPAK
- b. Dependent Variable: KETIMPANGAN EKONOMI REGIONAL

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.007	4	.002	85.409	.000 ^a
Residual	.002	29	.000		
Total	.009	33			

- a. Predictors: (Constant), PERSENTASE MIGRASI MASUK, DANA PERIMBANGAN, PRODUKTIFITAS TANAMAN PADI, TPAK
- b. Dependent Variable: KETIMPANGAN EKONOMI REGIONAL

Coefficients^a

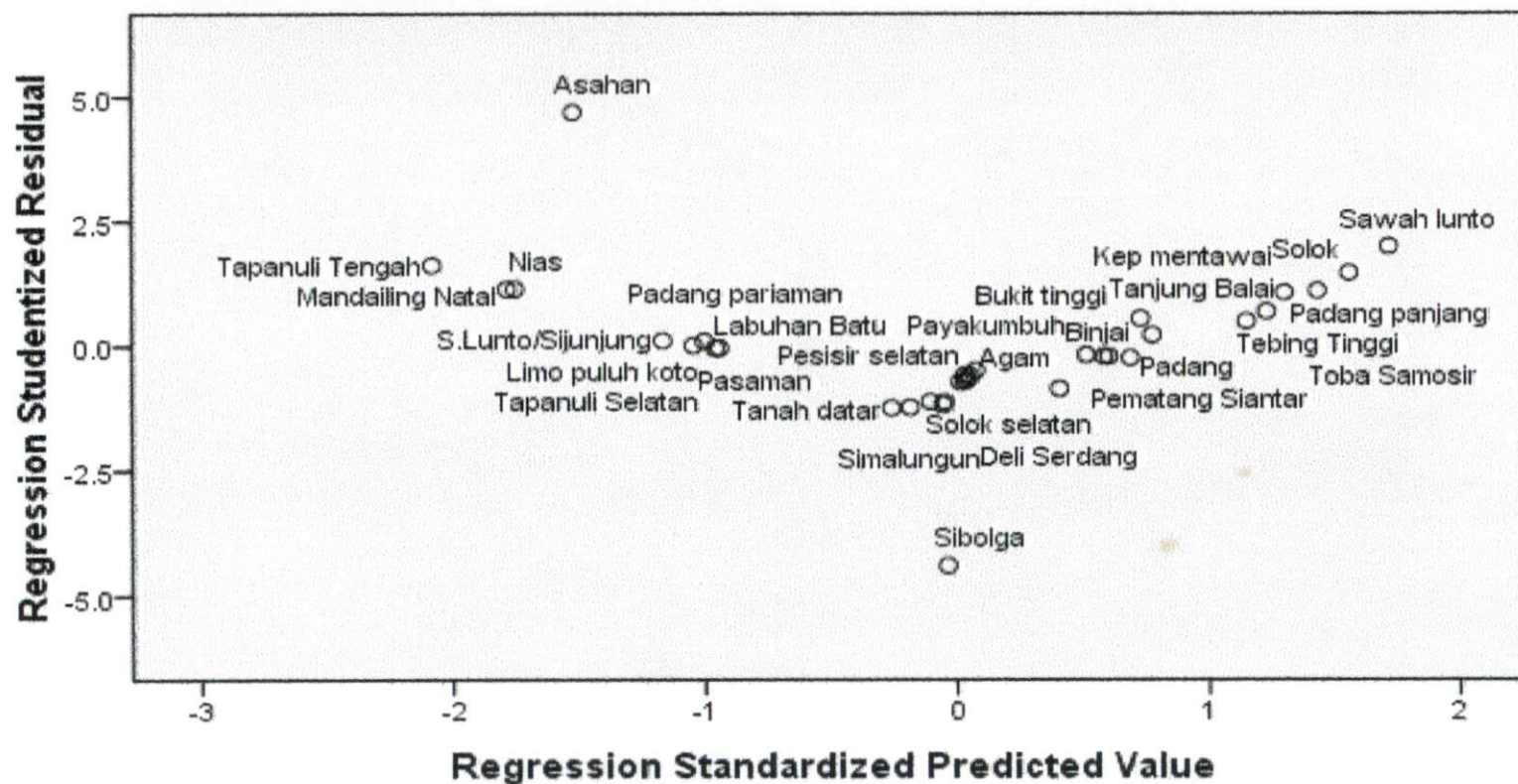
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	.325	.050		6.550	.000					
PRODUKTIFITAS TANAMAN PADI	-.006	.001	-.060	-2.609	.000	-.570	-.112	-.048	.645	1.549
TPAK	-.155	.009	-.677	-5.379	.000	-.857	-.707	-.427	.398	2.515
DANA PERIMBANGAN	-.032	.008	-.013	-2.122	.000	-.550	-.023	-.010	.536	1.865
PERSentase MIGRASI MASUK	-.011	.003	-.309	-3.414	.002	-.631	-.535	-.271	.767	1.304

a. Dependent Variable:

KETIMPANGAN EKONOMI
REGIONAL

Scatterplot

Dependent Variable: KETIMPANGAN EKONOMI REGIONAL



Lampiran III

Data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat

DAERAH	JUMLAH PENDUDUK							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kep mentawai	4860	62010	66300	67375	64540	66332	66332	68097
Pesisir selatan	348480	402420	415000	417106	423093	429647	429647	442257
Solok selatan	435950	450040	454900	457389	342930	347288	347288	355705
Sawah lunto/Sijunjung	311580	319890	337200	343819	188317	192997	192997	202275
Tanah datar	320960	332700	333600	339216	331576	334258	334258	335926
Padang pariaman	426990	443820	442400	375538	378208	318803	318803	387195
Agam	414930	427590	425100	428433	424789	426767	426767	429822
Limo puluh koto	311820	320370	322200	324258	324201	327203	327203	331771
Pasaman	514990	535290	547300	555486	244554	322356	322356	257374
Padang	720780	743220	764800	784740	799736	819765	819765	856815
Solok	48680	50000	52800	55709	54049	55784	55784	58473
Sawah lunto	50750	51760	52600	53837	53081	53327	53327	54907
Padang panjang	40860	41600	42800	44699	45439	49773	49773	54218
Bukit tinggi	92450	93660	97800	100254	100512	102515	102515	106045
Payakumbuh	98440	100710	102100	104377	101819	104084	104084	105994
JUMLAH	4142520	4375080	4456900	4452236	3876844	3950899	3950899	4046874

Sumber : BPS Kota Padang, Data diolah.

Data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara

DAERAH	JUMLAH PENDUDUK							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Nias	699148	698994	422170	441807	441807	442061	442559.11	4434809
Mandailing Natal	386400	367990	369691	386807	386807	413799	417642.342	423706
Tapanuli Selatan	749003	761205	596188	626702	626702	629136	325041.459	263766
Tapanuli Tengah	249668	270600	272333	286035	286035	294399	307692.308	314663
Tapanuli Utara	407831	407581	255162	256201	256201	256389	263696.976	267591
Toba Samosir	306373	258615	285586	158677	158677	169112	169295.478	171818
Labuhan Batu	863438	305258	910502	951773	951773	987145	1007174.01	2882775
Asahan	943822	987244	990230	1024369	1024369	1038621	676569.83	688509
Simalungun	863679	808210	808288	826101	826101	841217	846281.541	853102
Dairi	295323	289323	255847	261287	261287	267666	268771.732	493894
Karo	287854	305452	306869	316207	316207	342574	351332.288	360893
Deli Serdang	2021021	2041121	2054707	1569638	1569638	1634100	1686330.38	1738455
Langkat	921911	936925	940601	970433	970433	1013846	1027354.26	1042588
Sibolga	84034	85100	85505	88717	88717	845831	93186.5465	94607
Tanjung Balai	136621	143836	144979	152814	152814	156500	159971.306	163686
Pematang Siantar	254099	223824	223949	230487	230487	235385	236638.887	238782
Tebing Tinggi	126302	132306	132760	135671	135671	137918	139393.939	141078
Medan	1933746	1972248	1979340	2036185	2036185	2067287	2083167.42	2102105
Binjai	219122	224244	225535	237904	237904	244253	248238.117	252620
JUMLAH	11749395	11220076	11260242	10957815	10957815	12017240.4	10750337.9	16929447

Sumber : BPS Kota Padang, Data diolah.

Data PDRB Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat

DAERAH	PDRB PERKAPITA							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kep mentawai	6337470	7335348	7678277	8431860	10267723	12012000	13580000	16150000
Pesisir selatan	3692612	4023356	4227396	4640905	5375206	6178000	7072000	8095000
Solok selatan	4180729	4766664	5142242	6001245	7115276	8317000	9731000	11416000
Sawah lunto/Sijunjung/D	5385394	6017285	6240947	7047665	8131050	9433000	10487000	11969000
Tanah datar	5324237	6014072	6552699	7186462	8603516	10156000	11382000	12999000
Padang pariaman	5002638	5763011	5736432	6317507	7883815	10189000	11396000	13245000
Agam	4812861	5450935	6002427	6703815	7948471	9197000	10418000	12111000
Limo puluh koto	5990603	6704290	7250845	8099199	9487304	11156000	12736000	15137000
Pasaman	5087631	5717054	6073124	5334038	6507461	7671000	8826000	10070000
Padang	11075279	12652494	12385324	14620525	16576536	18657000	20722000	23487000
Solok	7315152	8105642	8224668	9059450	10551025	12115000	13249000	15188000
Sawah lunto	9003959	975774	9853393	10758344	11793581	12705000	13897000	15751000
Padang panjang	6786047	7670083	8175187	9060008	9664059	11033000	11970000	13467000
Bukit tinggi	7312582	8116516	8425365	9178003	10786006	12375000	13768000	16022000
Payakumbuh	5677553	6509115	6974747	7775338	9234548	10885000	12195000	14286000
JUMLAH	92984749	95821639	108943073	120214365	139925577	162079000	181429000	209393000

Sumber : BPS Kota Padang, Data diolah.

Data PDRB Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara

DAERAH	PDRB PERKAPITA							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Nias	3271709	3793688	4307071	4861036	4888629	6248000	7190000	8268000
M.Natal	3506286	3867809	4369299	4727153	4939939	5464000	6235000	7281000
T. Selatan	3929813	4472648	5025391	5427688	5859948	6679000	7236000	9698000
T.Tengah	2981930	3353684	3736261	4143009	4481774	4882000	5252000	5749000
T.Utara	4402626	5052537	6062064	6838788	8408548	9431000	10349000	11682000
Toba.Samosir	5424845	6237834	10359541	11104918	11729944	12542000	14265000	15982000
L.Batu	8229816	8803103	9618574	11514786	12892745	12758000	14218000	16174000
Asahan	9685198	10737520	12824628	14375987	15156520	6991000	12151000	13872000
Simalungun	5172938	5666712	6286471	6812099	7423633	8181000	9036000	9864000
Dairi	5385963	6065709	6802321	7928545	8644227	9538000	10641000	6305000
Karo	8129852	8810317	9739895	10471676	11053052	11615000	12760000	14018000
Deli Serdang	6311720	7801445	8790622	10189228	12348601	13132000	15443000	17324000
Langkat	6010330	6353514	7028627	7705527	8476289	9750000	11150000	12703000
Sibolga	5990086	6660756	7472052	8235156	9122437	10242000	11536000	13054000
T. Balai	7236581	8075142	9289435	10547967	11556011	12607000	13940000	15151000
P. Siantar	6373169	7171019	8439190	11053699	11457267	11683000	13079000	14486000
T.Tinggi	3271709	3793688	4307071	4861036	4888629	6248000	7190000	8268000
Medan	3506286	3867809	4369299	4727153	4939939	5464000	6235000	7281000
Binjai	3929813	4472648	5025391	5427688	5859948	6679000	7236000	9698000
JUMLAH	2981930	3353684	3736261	4143009	4481774	4882000	5252000	5749000

Sumber : BPS Kota Padang, Data diolah.

Data Tingkat Ketimpangan ekonomi Regional Antar Kabupaten/Kota Propinsi SumateraBarat dan Propinsi Sumatera Utara

NO	DAERAH	TINGKAT KETIMPANGAN								Rata-Rata
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
1	Kep mentawai	0.153	0.056	0.048	0.047	0.047	0.048	0.049	0.048	0.062
2	Pesisir selatan	0.012	0.014	0.015	0.015	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016
3	Solok selatan	0.016	0.016	0.016	0.016	0.012	0.012	0.012	0.012	0.014
4	Sawah lunto/Sijunjung	0.002	0.004	0.007	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005
5	Tanah datar	0.003	0.005	0.006	0.006	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007
6	Padang pariaman	0.013	0.014	0.014	0.011	0.013	0.007	0.012	0.007	0.011
7	Agam	0.013	0.013	0.013	0.013	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014
8	Limo puluh koto	0.001	0.001	0.002	0.002	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004
9	Pasaman	0.018	0.019	0.019	0.020	0.006	0.011	0.006	0.011	0.014
10	Padang pariaman	0.012	0.014	0.020	0.020	0.029	0.029	0.030	0.029	0.023
11	Solok	0.087	0.074	0.061	0.059	0.055	0.054	0.052	0.054	0.062
12	Sawah lunto	0.115	0.001	0.080	0.078	0.067	0.060	0.058	0.060	0.065
13	Padang panjang	0.084	0.074	0.067	0.066	0.053	0.050	0.046	0.050	0.061
14	Bukit tinggi	0.060	0.051	0.042	0.040	0.036	0.036	0.035	0.036	0.042
15	Payakumbuh	0.037	0.032	0.029	0.029	0.026	0.027	0.027	0.027	0.029
16	Nias	0.009	0.010	0.003	0.004	0.005	0.002	0.004	0.002	0.005
17	Mandailing Natal	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002
18	Tapanuli Selatan	0.009	0.010	0.007	0.008	0.008	0.006	0.001	0.006	0.007
19	Tapanuli Tengah	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002	0.000	0.001
20	Tapanuli Utara	0.002	0.001	0.010	0.009	0.012	0.017	0.012	0.017	0.010
21	Toba Samosir	0.012	0.016	0.030	0.041	0.039	0.042	0.038	0.042	0.032
22	Labuhan Batu	0.001	0.027	0.006	0.007	0.007	0.007	0.011	0.007	0.009
23	Asahan	0.002	0.002	0.001	0.004	0.005	0.014	0.004	0.014	0.006
24	Simalungun	0.010	0.009	0.010	0.011	0.011	0.009	0.012	0.009	0.010

25	Dairi	0.013	0.012	0.014	0.014	0.013	0.016	0.013	0.016	0.014
26	Karo	0.032	0.027	0.025	0.020	0.018	0.019	0.013	0.019	0.022
27	Deli Serdang	0.027	0.029	0.029	0.022	0.022	0.021	0.025	0.021	0.024
28	Langkat	0.009	0.011	0.012	0.013	0.013	0.012	0.014	0.012	0.012
29	Sibolga	0.045	0.043	0.041	0.038	0.038	0.007	0.039	0.007	0.032
30	Tanjung Balai	0.046	0.043	0.042	0.041	0.039	0.044	0.038	0.044	0.042
31	Pematang Siantar	0.023	0.025	0.025	0.032	0.028	0.028	0.024	0.028	0.027
32	Tebing Tinggi	0.036	0.033	0.031	0.028	0.029	0.034	0.030	0.034	0.032
33	Medan	0.022	0.025	0.025	0.028	0.025	0.019	0.026	0.019	0.023
34	Binjai	0.023	0.022	0.022	0.021	0.021	0.028	0.024	0.028	0.024

Sumber : BPS Kota Padang, Data diolah.

Data Variabel Dependen (Y) Dan Variabel Independen (X) Pada Tahun 2008

NO	DAERAH	VARIABEL				
		Ketimpangan	Kandungan Sumber	Kondisi Demografis	Persentase Migrasi	Dana
			Daya Alam	TPAK	Masuk	Perimbangan
	(satuan)	(0-1)	(dalam log/Ton)	(dalam Log/%)	(%)	(dalam Log/Rupiah)
1	Kep mentawai	0.04779	1,481	50.89	7.78	89,995,769
2	Pesisir selatan	0.01735	100,222	60.14	24.51	145,160,880
3	Solok selatan	0.01199	151,212	60.47	29.85	155,057,891
4	S.Lunto/Sijunjung	0.00443	698,971	75.37	36.85	265,523,064
5	Tanah datar	0.00817	664,486	61.96	34.75	260,087,727
6	Padang pariaman	0.00682	674,607	72.82	35.91	264,735,789
7	Agam	0.01586	105,014	60.31	26.45	149,911,011
8	Limo puluh koto	0.00553	689,852	73.43	36.51	262,506,152
9	Pasaman	0.01119	166,407	61.01	30.58	196,295,444
10	Padang	0.02945	26,758	53.71	18.5	142,801,898
11	Solok	0.05410	13,216	49.37	4.31	196,359,934
12	Sawah lunto	0.05989	1,365	49.26	3.25	190,445,086
13	Padang panjang	0.04987	1,454	50.15	6.45	79,318,657
14	Bukit tinggi	0.03579	21,064	52.09	25.8	122,928,164
15	Payakumbuh	0.02729	30,826	55.08	22.12	141,245,352
16	Nias	0.00210	715,061	86.04	38.64	281,549,898
17	Mandailing Natal	0.00260	706,597	85.45	38.63	271,381,225
18	Tapanuli Selatan	0.00640	678,787	72.23	35.25	262,708,203
19	Tapanuli Tengah	0.00010	721,667	90.93	40.51	889,762,876
20	Tapanuli Utara	0.01670	100,594	60.17	25.41	142,211,913
21	Toba Samosir	0.04160	9,038	50.26	12.54	117,365,820
22	Labuhan Batu	0.00670	665,179	72.01	34.94	263,880,154

23	<i>Asahan</i>	0.01370	128,979	60.33	2875	142,742,168
24	<i>Simalungun</i>	0.00940	651,858	61.02	34.32	258,971,638
25	<i>Dairi</i>	0.01620	101,758	60.22	25.61	149,604,021
26	<i>Karo</i>	0.01850	97,401	60.12	23.12	139,298,129
27	<i>Deli Serdang</i>	0.02070	35,033	56.28	22.55	142,095,711
28	<i>Langkat</i>	0.01150	162,956	60.49	30.12	155,263,025
29	<i>Sibolga</i>	0.00690	0	63.33	35.85	200,274,670
30	<i>Tanjung Balai</i>	0.04410	1,412	50.61	10.42	94,777,301
31	<i>Pematang Siantar</i>	0.02840	30,542	54.30	20.56	138,899,756
32	<i>Tebing Tinggi</i>	0.03410	26,471	52.87	17.8	133,044,373
33	<i>Medan</i>	0.01880	85,999	60.11	22.52	1,086,048,630
34	<i>Binjai</i>	0.02810	30,623	54.34	21.58	137,228,496
<i>Total</i>		0.71214	8,296,890	2097.17	3,709	7,669,480,825
<i>Rata-Rata</i>		0.02095	244026	61.68	109	225,572,965

Sumber : BPS Kota Padang, Data diolah.